

# KEBIJAKAN PUBLIK DAN IMPLEMENTASI **MERDEKA BELAJAR** **KAMPUS MERDEKA**



## PENULIS

Usanto S., S.Kom., M.Kom.

Sak Khie, S.E., M.M.

Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Dipl.-Ing. H.R. Agung Hardianto Wibowo, M.Sc. M.E.

Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.

Ida Farida Fitriyani, S.Ag., S.Kep., M.M., M.Kes

# **KEBIJAKAN PUBLIK DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Usanto S., S.Kom., M.Kom.

Sak Khie, S.E., M.M.

Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Dipl.-Ing. H.R. Agung Hardianto Wibowo, M.Sc. M.E.

Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.

Ida Farida Fitriyani, S.Ag., S.Kep., M.M., M.Kes



Divisi Penulisan dan Publikasi

D E P O K

## KEBIJAKAN PUBLIK DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

---

*Penulis:*

Usanto S., S.Kom., M.Kom.

Sak Khie, S.E., M.M.

Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Dipl.-Ing. H.R. Agung Hardianto Wibowo, M.Sc. M.E.

Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.

Ida Farida Fitriyani, S.Ag., S.Kep., M.M., M.Kes

---

ISBN:

---

*Editor:*

Dr. Ikka Kartika, M.Pd.

Dr. Yossal Iriantara, M.M.Pd.

*Copy Editor:*

Lindawati

*Setter:*

Tim Redaksi

---

Diterbitkan oleh

PT Smart Solution Center

Kp. Pondok Ranga No. 27

Kel. Curug, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat 16517

Telp. 0813 8888 4630

Laman: [www.smartcenters.net](http://www.smartcenters.net)

---

Cetakan ke-1, Juni 2023

---

Hak cipta 2023, pada Penulis

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Kebijakan Publik dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka”, dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Kebijakan publik memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan perubahan sosial, termasuk dalam sektor pendidikan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan tersebut saat ini tengah menjadi sorotan. Konsep inovatif yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menawarkan pendekatan baru dalam memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengatur dan merancang kurikulum mereka sendiri.

Buku ini menggali lebih dalam mengenai kebijakan publik tersebut dan melihat implementasinya di lingkungan kampus. Dalam buku ini disajikan kebijakan publik, gambaran perubahan yang terjadi, tantangan yang dihadapi, dan manfaat yang dapat dicapai melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, MBKM dapat menjadi salah satu kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan interaktivitas pembelajaran.

Oleh karenanya, buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep dasar MBKM serta penerapannya dalam dunia pendidikan. Tim penulis berharap buku ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi para akademisi, pengajar, dan mahasiswa dalam memahami konsep MBKM dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh tim penulis harapkan. Semoga Buku ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca.

Tim Penulis

## RINGKASAN

Buku berjudul “Kebijakan Publik dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka” ini terdiri dari 6 (enam) bab yang berkaitan dengan 8 (delapan) kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Buku ini membahas kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan implementasinya dalam delapan macam kegiatan, yaitu pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata. Kebijakan MBKM merupakan inisiatif yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih dan merancang jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan tersebut terlihat melalui enam dari delapan macam kegiatan yang memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman sebagai berikut: (1) Pertukaran pelajar menjadi salah satu kegiatan yang mendorong mahasiswa untuk mengalami pengalaman belajar di luar negeri, memperluas wawasan budaya, dan meningkatkan kemampuan adaptasi; (2) Magang/praktik kerja memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam konteks nyata di dunia kerja, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman berharga dan membangun koneksi profesional; (3) Asistensi mengajar di satuan pendidikan memberikan mahasiswa kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran, membantu dosen atau guru, dan mengembangkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan; (4) Proyek kemanusiaan mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka dapat mengembangkan empati, rasa tanggung jawab sosial, dan keterampilan sosial; (5) Kegiatan wirausaha memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan berbisnis melalui pendirian dan

pengelolaan usaha kecil atau startup; (6) Studi/proyek independen memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar secara mandiri di luar kurikulum, mengeksplorasi minat pribadi, dan mengembangkan kemampuan penelitian, analisis, dan kreativitas mereka. Berbagai kegiatan ini memberikan fleksibilitas, otonomi, dan kebebasan kepada mahasiswa dalam menentukan studi dan mengembangkan dirinya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I .....	- 1 -
PENINGKATAN SOFT SKILLS MAHASISWA MELALUI STUDI INDEPENDEN DALAM MEMAHAMI POTENSI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA SEBAGAI SOLUSI PENDIDIKAN DI MASA DEPAN.....	- 1 -
1. Pendahuluan .....	- 1 -
2. Permasalahan .....	- 7 -
3. Metodologi Penelitian .....	- 8 -
4. Pembahasan .....	- 9 -
5. Kesimpulan.....	- 17 -
Daftar Pustaka .....	- 21 -
BAB II.....	- 23 -
PERAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI PERGURUAN TINGGI.....	- 23 -
1. Pendahuluan .....	- 23 -
2. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).....	- 24 -
3. Tujuan Dan Dasar Hukum Pelaksanaan Program MBKM .....	- 27 -
4. Peran Kebijakan Publik terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengembangan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi. -	30 -

4.1 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengembangan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi .....	- 30 -
4.2 Peran Kebijakan Publik dalam Pengembangan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi.....	- 32 -
4.3 Peran Kebijakan Publik terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengembangan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi .....	- 34 -
5. Tantangan Implementasi Program MBKM .....	- 35 -
6. Kesimpulan.....	- 38 -
Daftar Pustaka .....	- 39 -

BAB III.....	- 41 -
KEBIJAKAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PENINGKATAN SOFT SKILLS MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA .....	- 41 -

1. Pendahuluan .....	- 41 -
2. Permasalahan .....	- 48 -
3. Metode Penelitian.....	- 49 -
4. Pembahasan .....	- 50 -
5. Kesimpulan.....	- 65 -
Daftar Pustaka .....	- 67 -

BAB IV .....	- 69 -
EVALUASI KEBIJAKAN MBKM ASISTENSI MENGAJAR YANG INKLUSIF DAN RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MAHASISWA SEBAGAI PROSES PENINGKATAN SOFT SKILL DI LINGKUNGAN AKADEMIK ..	- 69 -

1. Pendahuluan .....	- 69 -
2. Permasalahan .....	- 73 -
3. Metode Penelitian.....	- 74 -



4. Pembahasan .....	- 75 -
5. Kesimpulan.....	- 85 -
Daftar Pustaka .....	- 86 -
 BAB V .....	- 87 -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA RELEVANSINYA TERHADAP KEGIATAN PROYEK KEMANUSIAAN DI ERA 5.0 DALAM MEMBENTUK MAHASISWA ITB SWADHARMA YANG BERKARAKTER SERTA PROFESIONAL .....	- 87 -
1. Pendahuluan .....	- 87 -
2. Permasalahan .....	- 93 -
3. Metodologi Penelitian .....	- 94 -
4. Pembahasan .....	- 95 -
5. Kesimpulan.....	- 102 -
Daftar Pustaka .....	- 104 -
 BAB VI .....	- 105 -
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN RELEVANSINYA DALAM KEGIATAN MAGANG UNTUK PENINGKATAN SOFTSKILL MAHASISWA .....	- 105 -
1. Pendahuluan .....	- 105 -
2. Permasalahan .....	- 110 -
3. Metodologi Penelitian .....	- 111 -
4. Pembahasan .....	- 112 -
4.1 Bentuk Pelaksanaan Magang .....	- 112 -
4.2 Pelaksanaan Program Magang MBKM .....	- 112 -
5. Kesimpulan.....	- 122 -
Daftar Pustaka .....	- 129 -
 BIOGRAFI PENULIS .....	- 131 -

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Studi Independen.....	- 6 -
Gambar 2 Skema Studi Independen Opsional.....	- 7 -
Gambar 3 Diagram Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap MBKM.....	- 15 -
Gambar 4 Alur Tahapan Program Pertukaran Pelajar.....	- 46 -
Gambar 5 Delapan Program Pengayaan Mahasiswa di Luar Kampus...	- 58 -
Gambar 6 Tiga Contoh Program Microcredentials-Magang Bersertifikat.	- 62 -
Gambar 7 Tiga Contoh Program Studi Independen yang menjadi Unggulan LPDP Tahun 2021 .....	- 63 -
Gambar 8 Pendaftaran dan Pelaksanaan Asistensi Mengajar .....	- 78 -
Gambar 9 Pembimbingan dan Penilaian Asistensi Mengajar.....	- 79 -
Gambar 10 Pengetahuan Mahasiswa terhadap Kebijakan MBKM.....	- 99 -
Gambar 11 Dosen Pembimbing .....	- 113 -
Gambar 12 Pemahaman Dosen tentang MBKM.....	- 114 -
Gambar 13 Sosialisasi MBKM ke Dosen .....	- 115 -
Gambar 14 Arahkan Dosen kepada Mahasiswa.....	- 116 -
Gambar 15 Komunikasi Dosen kepada Mahasiswa.....	- 117 -
Gambar 16 Sosialisasi MBKM ke Mahasiswa.....	- 119 -
Gambar 17 Pemahaman Mahasiswa tentang MBKM .....	- 119 -
Gambar 18 Informasi MBKM .....	- 120 -
Gambar 19 Kesesuaian dengan Harapan Mahasiswa .....	- 121 -
Gambar 20 Kesesuaian dengan Bidang Ilmu.....	- 122 -

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kendala Implementasi Program MBKM .....	- 95 -
---	--------

# **BAB I**

## **PENINGKATAN SOFT SKILLS MAHASISWA MELALUI STUDI INDEPENDEN DALAM MEMAHAMI POTENSI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA SEBAGAI SOLUSI PENDIDIKAN DI MASA DEPAN**

Usanto S  
Universitas Islam Nusantara, Bandung  
usanto1006@gmail.com

### **1. PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan sebuah negara. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai program dan kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu program yang sedang gencar diperjuangkan oleh pemerintah adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta memberikan kampus-kampus otonomi untuk mengatur kebijakan internal mereka sendiri.

Pendidikan di era globalisasi ini memerlukan transformasi yang signifikan dalam hal cara pengajaran dan pembelajaran. Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merupakan upaya untuk menghadapi tantangan tersebut. Konsep ini mengedepankan kemandirian mahasiswa dalam memilih, merencanakan, dan mengevaluasi kegiatan akademik mereka sendiri, dengan bimbingan dan dukungan dari dosen pembimbing. Dalam era digital seperti sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki peran penting dalam mendukung konsep merdeka belajar dan kampus merdeka. *Platform* digital dapat

membantu mahasiswa dalam mengakses sumber belajar, berkomunikasi dengan dosen pembimbing dan kolega sejawat, serta memonitor kemajuan belajar mereka sendiri.

Salah satu manfaat dari konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah peningkatan *soft skills* mahasiswa. *Soft skills* menjadi penting karena mereka dapat membantu mahasiswa dalam menghadapi tantangan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Studi independen menjadi salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan *soft skills* mahasiswa. Studi independen memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan seperti manajemen waktu, pemecahan masalah, dan kemampuan belajar mandiri.

Mahasiswa yang terlibat dalam program kampus merdeka memiliki kemampuan untuk mengembangkan *soft skills* seperti keterampilan interpersonal, komunikasi, dan kemampuan belajar mandiri (Pramono dan Hidayat, 2020). Studi independen secara signifikan meningkatkan keterampilan belajar mandiri dan keterampilan pemecahan masalah mahasiswa (Widiastuti et al. 2021). Sedangkan Akmaliah (2021) mengatakan bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam menghasilkan ide-ide baru. Dalam penelitiannya, Akmaliah menemukan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan berinovasi dalam menyelesaikan masalah.

Studi independent pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan publik yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, dan memberikan kampus-kampus otonomi untuk mengatur kebijakan internal mereka sendiri. Kebijakan studi independen pada program Merdeka Belajar

Kampus Merdeka dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi ( Agung Priyambodo dan Aulia Iskandarsyah, 2020).

Sedangkan menurut Kurniawan dan Wuryanto (2020) menunjukkan bahwa kebijakan studi independen pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. Namun, terdapat juga tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti kurangnya dukungan dari dosen dan staf perguruan tinggi, serta kurangnya infrastruktur pendukung. Menurut Purwanto, dkk. (2021), mayoritas mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap kebijakan ini dan merasa lebih leluasa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka melalui pemilihan mata kuliah yang disesuaikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Hadiyanti (2020) menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan ini, seperti kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, serta kurangnya dukungan dari staf dan dosen di perguruan tinggi.

Dalam konteks global, kebijakan studi independen pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sejalan dengan upaya global untuk mendorong pendidikan berbasis keterampilan (*skill-based education*). Kebijakan ini dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. (Rhorom, dkk. 2020). Kebijakan publik merupakan segala bentuk keputusan, tindakan, atau intervensi yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kebijakan publik yang saat ini sedang gencar dibahas di Indonesia adalah program studi independent dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dengan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta memberikan kampus-kampus otonomi untuk mengatur kebijakan internal mereka sendiri. Studi independen dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki tujuan yang mulia, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi. Salah satu kebijakan publik yang terkait dengan program MBKM adalah kebijakan studi independen. Kebijakan ini memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Dengan kebijakan ini, diharapkan mahasiswa dapat meraih prestasi akademik yang lebih baik dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Studi independen dapat diartikan sebagai metode pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah dan mengatur jadwal belajar mereka sendiri. Metode pembelajaran ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Melalui studi independen, mahasiswa dapat membangun kemandirian dalam belajar dan mengembangkan kreativitas mereka.

Kebijakan publik terkait studi independen pada program MBKM memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Kebijakan ini dilaksanakan dengan memberikan kampus-kampus otonomi untuk mengatur kebijakan internal mereka sendiri. Dalam kebijakan ini, perguruan tinggi harus memastikan bahwa mahasiswa telah memenuhi persyaratan untuk dapat memilih mata kuliah secara mandiri. Implementasi kebijakan studi

independen pada program MBKM merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan kebijakan ini membutuhkan perubahan budaya di lingkungan perguruan tinggi, terutama dalam hal mengubah paradigma pengajaran dari dosen ke mahasiswa.

Dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Kemendikbudristek, program studi harus mampu menyesuaikan diri agar dapat memberikan opsi konversi SKS bagi mahasiswa semester 6. Tujuan dari program MBKM adalah untuk memperkuat capaian lulusan dalam pengetahuan, keterampilan, dan etika, mempersiapkan lulusan untuk menjadi pemimpin masa depan yang unggul, dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik mereka sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat studi mereka. Program MBKM menekankan pembelajaran berpusat pada mahasiswa *Student Centered Learning* (SCL), yang melibatkan pengembangan kreativitas, kapasitas, dan sikap mandiri dalam mencari pengetahuan. Penting untuk mengembangkan strategi dan metode penilaian yang lebih fleksibel agar mahasiswa dapat lebih terlibat dalam pembelajaran.

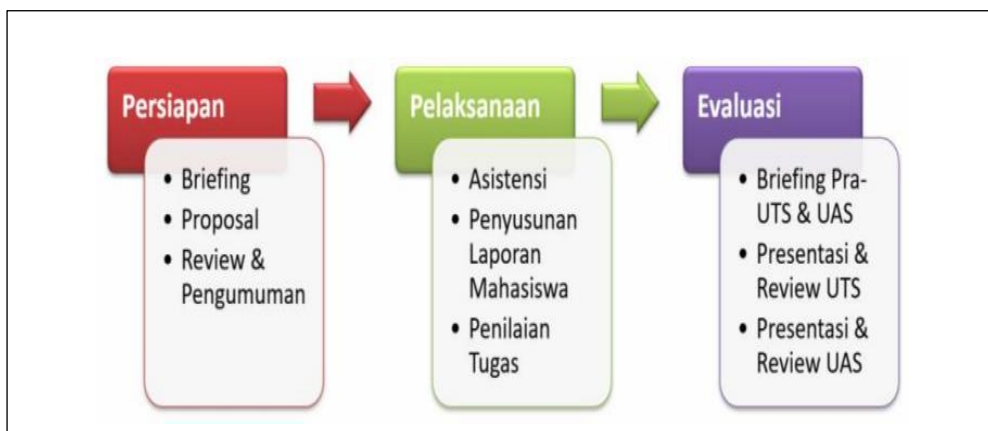
Studi Independen merupakan pembelajaran yang didasarkan pada tantangan industri, yang membantu mahasiswa mempelajari topik-topik terkini di dunia industri, dan program studi independen dapat menjadi jembatan antara perguruan tinggi dan industri (Junaidi & dkk, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulloh (2020), mahasiswa yang terlibat dalam program studi independen merdeka belajar dan kampus merdeka memiliki peningkatan kemampuan belajar mandiri dan keterampilan soft skills seperti kemampuan berkomunikasi dan kolaborasi

Pada semester 6 program studi independen, langkah persiapan terdiri dari pengenalan program kepada mahasiswa peserta, penyerahan proposal oleh mahasiswa, serta peninjauan dan pengumuman hasil *review* atas proposal tersebut. Setelah itu, tahap pelaksanaan dimulai dengan mahasiswa menjalankan program studi independen secara independen



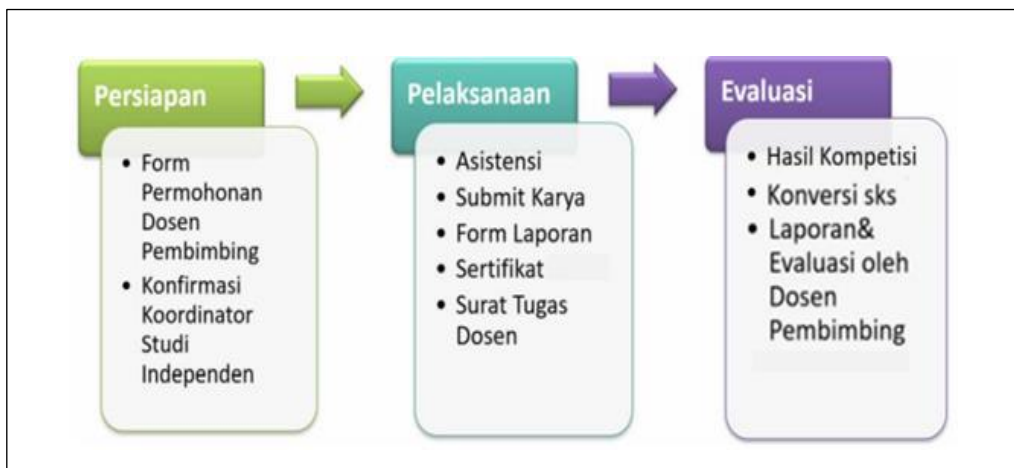
sesuai dengan proposal yang disetujui, memberikan bantuan kepada dosen pembimbing, dan membuat laporan hasil studi independen. Tahap pelaksanaan berakhir dengan penilaian oleh dosen pembimbing. Langkah berikutnya adalah evaluasi yang meliputi pra ujian tengah semester dan ujian akhir semester, presentasi oleh mahasiswa, dan tinjauan serta penilaian hasil studi independen tersebut. Skema tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Skema Studi Independen



Tata cara program studi independen untuk mengonversi sks sedikit berbeda karena diatur oleh panitia penyelenggara kompetisi. Prosesnya terdiri dari tahap persiapan, di mana mahasiswa mengajukan Form Permohonan Dosen Pembimbing dan mendapatkan konfirmasi dari Koordinator Studi Independen. Kemudian tahap pelaksanaan melibatkan proses asistensi, pengiriman karya sesuai dengan ketentuan panitia penyelenggara, pengisian laporan, proses sertifikasi, serta pengajuan surat tugas dosen sebagai pembimbing mahasiswa peserta kompetisi. Tahap evaluasi didasarkan pada hasil kompetisi, dan mengkonversi SKS. Dalam tahap ini, dosen pembimbing juga akan menilai dan mengevaluasi laporan mahasiswa. Skema studi independen opsional dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 Skema Studi Independen Opsional



Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah diluncurkan sejak tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020. Program ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan kebebasan belajar kepada mahasiswa dan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya pembelajaran yang berkualitas. Mahasiswa yang terlibat dalam studi independen memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan penelitian ilmiah dan menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam situasi dunia nyata (Amaliah dan Hidayat, 2021).

## 2. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada pada kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan studi independent adalah sebagai berikut: (1) Kurangnya kesadaran mahasiswa akan pentingnya soft skills dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja di masa depan. (2) Terbatasnya waktu dan sumber daya bagi mahasiswa untuk mengembangkan *soft skills* di dalam kelas.

(3) Tidak adanya panduan yang jelas atau kurangnya pengetahuan tentang bagaimana melakukan studi independen dengan efektif. (4) Terbatasnya dukungan dari pihak Perguruan Tinggi dalam mendorong konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka di kalangan mahasiswa. (5) Tantangan dalam menilai pencapaian *soft skills* mahasiswa yang dapat diukur secara objektif.

Selain itu masalah-masalah yang dihadapi pengembangan studi independen yaitu: (1) Mengintegrasikan pengembangan *soft skills* ke dalam kurikulum pendidikan formal. Tantangan dalam mengatasi perbedaan kemampuan, minat, dan motivasi di antara mahasiswa dalam melaksanakan studi independen. (2) Kurangnya dukungan dan fasilitas untuk mengembangkan studi independen di Perguruan Tinggi tertentu. Beberapa Perguruan Tinggi mungkin tidak memiliki dukungan dan fasilitas yang memadai untuk membantu mahasiswa melakukan studi independen. (3) Tantangan dalam mengatasi hambatan internal yang dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan *soft skills* melalui studi independen. (4) Masalah dalam menumbuhkan budaya belajar yang mandiri dan kreatif di kalangan mahasiswa. (5) Tantangan dalam mengatasi kendala teknis dalam melakukan studi independen, seperti masalah akses internet dan kekurangan fasilitas yang diperlukan. (6) Tantangan dalam mengintegrasikan hasil belajar dari studi independen dengan hasil belajar dari pembelajaran formal di kelas.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti memilih ITB Swadharma sebagai lokasi penelitian karena ITB Swadharma ini merupakan salah satu institut yang menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan telah memiliki pengalaman dalam implementasi kebijakan studi independen.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan kepada informan yang terdiri dari mahasiswa, dosen pembimbing, dan staf perguruan tinggi yang terlibat dalam implementasi kebijakan studi independent pada program MBKM. Wawancara dilakukan dengan panduan kuesioner terstruktur dan dilakukan secara tatap muka maupun daring.

Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran dan interaksi antara mahasiswa dan dosen di kelas. Peneliti juga mengamati proses pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan studi independent di perguruan tinggi. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi partisipatif dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Peneliti melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan tema-tema yang muncul dari data. Peneliti juga melakukan triangulasi data dengan mengumpulkan data dari sumber yang berbeda, seperti dokumen kebijakan dan laporan evaluasi dari perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

#### **4. PEMBAHASAN**

Menganalisis kebijakan adalah kegiatan untuk merumuskan pengetahuan tentang langkah-langkah pembuatan kebijakan yang melibatkan keterkaitan antara penyebab, dampak, dan kinerja kebijakan. Menurut William Dunn (dalam Sulistyaningrum, 2022), analisis kebijakan publik digunakan untuk memahami esensi kebijakan yang mencakup informasi tentang masalah publik yang akan diatasi dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Analisis kebijakan publik digunakan untuk memberikan pendekatan sistematis untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Proses analisis kebijakan melalui serangkaian tahap yang saling terkait, dimulai dari merumuskan masalah, membuat proyeksi atau

pengalaman kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, memantau/memonitor kebijakan, dan pada akhirnya mengevaluasi kebijakan. Analisis kebijakan publik dapat memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebijakan yang ada, tergantung pada jenis masalah yang dihadapi.

Ada tujuh langkah dalam analisis kebijakan publik, yaitu (1) merumuskan masalah kebijakan, (2) menetapkan tujuan yang jelas, realistis, dan terukur, (3) menentukan kriteria penilaian, (4) menyusun model untuk memprediksi akibat-akibat dari kebijakan yang diambil, (5) mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan yang baik, (6) menilai alternatif-alternatif tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk memilih alternatif terbaik, dan (7) merekomendasikan kebijakan terbaik untuk mengatasi masalah sosial yang ada. Semua langkah ini merupakan bagian dari proses analisis kebijakan yang digunakan dalam mengimplementasikan program Kampus Merdeka.

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) adalah salah satu dari delapan metode pembelajaran yang diselenggarakan dalam program Kampus Merdeka. MSIB memberikan kesempatan untuk mempelajari kelas dan rancangan yang didasarkan pada kenyataan perusahaan. Kegiatan dalam program ini dapat berupa kursus singkat, bootcamp, kursus daring terbuka secara besar-besaran (MOOC), dan kegiatan lainnya. Program ini diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM yang selaras dengan budaya organisasi dan sebagai penghubung dengan negara. MSIB didukung oleh tiga regulasi, yaitu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, dan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yang merupakan panduan fleksibel dengan pembaruan.

Dalam era globalisasi ini, transformasi dalam hal cara pengajaran dan pembelajaran menjadi sangat penting. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memperkenalkan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Konsep ini mengedepankan kemandirian mahasiswa dalam memilih, merencanakan, dan mengevaluasi kegiatan akademik mereka sendiri, dengan bimbingan dan dukungan dari dosen pembimbing. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dan membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.

Manfaat dari konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah peningkatan *soft skills* mahasiswa. *Soft skills* menjadi penting karena dapat membantu mahasiswa dalam menghadapi tantangan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Studi independen menjadi salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan *soft skills* mahasiswa. Studi independen memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan seperti manajemen waktu, pemecahan masalah, dan kemampuan belajar mandiri. Studi independen pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam menghasilkan ide-ide baru. Mahasiswa yang terlibat dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan berinovasi dalam menyelesaikan masalah.

Implementasi kebijakan studi independent pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki beberapa tantangan, seperti kurangnya dukungan dari dosen dan staf perguruan tinggi serta kurangnya infrastruktur pendukung. Namun, mayoritas mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap kebijakan ini dan merasa lebih leluasa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka melalui pemilihan mata kuliah yang disesuaikan.

Dalam konteks global, kebijakan studi independen pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sejalan dengan upaya global untuk mendorong pendidikan berbasis keterampilan (*skill-based education*). Kebijakan ini dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya *soft skills* dilakukan melalui berbagai cara, seperti menyelenggarakan seminar atau workshop, mengundang pembicara dari industri, dan menyediakan materi pendidikan tentang *soft skills* pada program perkuliahan. Pengembangan *soft skills* dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal dengan cara menambahkan mata kuliah atau program pendidikan yang fokus pada pengembangan *soft skills*. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif juga dapat meningkatkan pengembangan *soft skills* dalam kelas.

Menyediakan panduan dan dukungan untuk studi independen. Perguruan Tinggi dapat menyediakan panduan yang jelas tentang cara melakukan studi independen dengan efektif. Selain itu, Perguruan Tinggi juga dapat menyediakan dukungan berupa konseling atau bimbingan akademik untuk membantu mahasiswa yang kesulitan dalam melakukan studi independen. Merdeka Belajar Kampus Merdeka Perguruan Tinggi perlu memberikan dukungan yang lebih kuat untuk konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan mengintegrasikan pengembangan *soft skills* ke dalam kurikulum pendidikan formal dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk studi independen.

Perguruan Tinggi perlu mengembangkan alat ukur yang sesuai untuk menilai pencapaian *soft skills* mahasiswa secara objektif. Alat ukur ini dapat berupa kuesioner, tugas, atau proyek yang mengukur keterampilan seperti kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Perguruan Tinggi dapat membantu mahasiswa mengatasi hambatan

internal seperti kurangnya motivasi, kurangnya kemandirian, dan kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan dengan menyediakan program pembinaan atau bimbingan akademik. Perguruan Tinggi perlu mendorong penumbuhan budaya belajar yang mandiri dan kreatif di kalangan mahasiswa dengan cara memberikan kebebasan dan dukungan untuk mengembangkan proyek-proyek kreatif yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Perguruan Tinggi perlu menyediakan akses dan fasilitas yang memadai bagi mahasiswa untuk melakukan studi independent, seperti akses internet, perpustakaan, ruang belajar, dan laboratorium. Mengintegrasikan Hasil Belajar dari Studi Independen ke dalam Kurikulum Pendidikan Formal Hasil belajar dari studi independen dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal dengan cara memberikan pengakuan atau konversi.

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan ini, seperti kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, serta kurangnya dukungan dari staf dan dosen di perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan 12 orang yang terdiri dari staf dan dosen di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik, terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal dukungan dari staf dan dosen di perguruan tinggi (Purnomo dan Hadiyanti, 2020).

Persepsi mahasiswa terhadap kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap kebijakan ini dan merasa lebih leluasa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka melalui pemilihan mata kuliah yang disesuaikan. Penelitian ini dilakukan melalui survei *online*



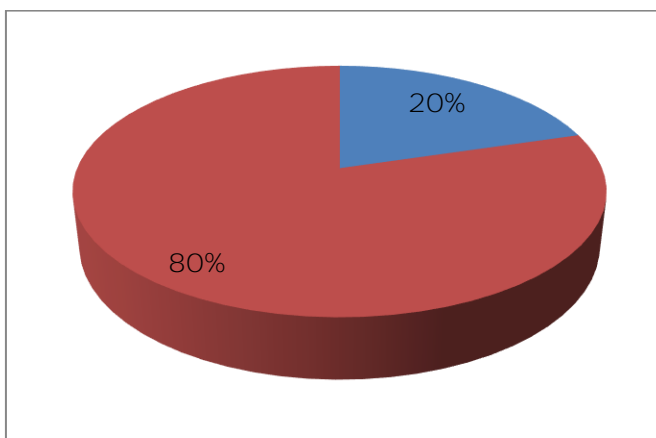
kepada 369 mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa 80,5% mahasiswa menyatakan bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan mereka kesempatan untuk memilih mata kuliah yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka, sedangkan 68,1% menyatakan bahwa kebijakan ini memberikan mereka kebebasan untuk menentukan jalur belajar yang lebih fleksibel.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Wuryanto (2020) tentang efektivitas kebijakan studi mandiri atau studi independen pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam meningkatkan prestasi akademik mahasiswa, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang efektivitas kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam meningkatkan keterampilan mahasiswa dan kebijakan studi mandiri dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa. Namun dalam implementasi kebijakan studi mandiri, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya dukungan dari dosen dan staf perguruan tinggi, serta kurangnya infrastruktur pendukung. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan kebijakan dan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Pada penelitian ini tentang “Peningkatan Soft Skills mahasiswa melalui studi independen dalam memahami potensi dan implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka sebagai solusi pendidikan di masa depan”. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis data menggunakan uji t-test. Sampel penelitian terdiri dari 40 mahasiswa yang terdaftar di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di ITB Swadharma. Hasilnya menunjukkan bahwa studi independent memiliki efek positif dan signifikan terhadap keterampilan

belajar mandiri dan keterampilan pemecahan masalah mahasiswa, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Hasilnya menunjukkan bahwa 87,2% mahasiswa menyatakan bahwa kebijakan ini membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, 85,6% menyatakan bahwa kebijakan ini membantu mereka untuk mengembangkan kreativitas, dan 83,6% menyatakan bahwa kebijakan ini membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan.

Gambar 3 Diagram Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap MBKM



Selain itu, kebijakan merdeka belajar kampus merdeka juga dapat mendorong mahasiswa untuk mengembangkan *soft skills* dengan lebih aktif melalui program-program pengembangan *soft skills* yang diintegrasikan ke dalam kurikulum. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan mata kuliah yang fokus pada pengembangan *soft skills*, seperti keterampilan berkomunikasi dan kepemimpinan, serta mengadakan pelatihan-pelatihan dan workshop-workshop yang terkait dengan *soft skills* di luar jam kuliah. Memperhatikan pengembangan *soft skills* dalam perencanaan dan penyusunan kurikulum pendidikan formal. Perguruan tinggi dapat

mempertimbangkan untuk menambahkan mata kuliah atau kegiatan yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan *soft skills* secara formal di dalam kelas.

Menyediakan panduan dan informasi yang jelas tentang studi independent, seperti panduan yang berisi strategi dan tips untuk melakukan studi independent secara efektif. Selain itu, pihak perguruan tinggi dapat juga mempertimbangkan untuk mengadakan pelatihan dan workshop tentang studi independent untuk mahasiswa. Meningkatkan dukungan perguruan tinggi dalam mendorong konsep merdeka belajar kampus merdeka di kalangan mahasiswa. Mengintegrasikan pengembangan soft skills ke dalam kurikulum pendidikan formal dengan lebih baik. Pihak universitas dapat mempertimbangkan untuk menambahkan mata kuliah atau kegiatan yang terkait dengan pengembangan *soft skills* di dalam kurikulum pendidikan formal. Menyediakan strategi yang berbeda-beda untuk membantu setiap mahasiswa mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. perguruan tinggi dapat mempertimbangkan penggunaan bimbingan akademik dan konseling karir untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.

Memperkuat dukungan dan fasilitas untuk mengembangkan studi independen di universitas tertentu. perguruan tinggi dapat mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memfasilitasi pengembangan soft skills mahasiswa melalui studi independen. Memberikan dukungan dan bimbingan untuk membantu mahasiswa mengatasi hambatan internal yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengembangkan soft skills melalui studi independen. Pihak universitas dapat memberikan bimbingan akademik dan konseling psikologi untuk membantu mahasiswa mengatasi hambatan tersebut.

Pembelajaran MBKM pada semester genap tahun akademik 2022/2023 telah dilakukan oleh mahasiswa Program Studi sistem informasi

dan teknik informatika, Fakultas Teknologi, Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma. Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2019 yang pernah mengikuti pembelajaran MBKM di kampus lain. Rentang usia responden adalah antara 19 hingga 21 tahun. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui *google form* setelah responden melakukan ujian akhir dan memperoleh hasil belajar, yang sekitar bulan Februari sampai Maret 2022. Menurut responden, media yang sering digunakan dalam pembelajaran MBKM adalah Google Meet sebanyak 63%, Vi-Learning sebanyak 31% dan Zoom 6%. Pembelajaran selama satu semester dilakukan secara *online* (melalui jaringan) karena pandemi Covid-19. Pada indikator teknis terdapat tiga pernyataan mengenai sinyal internet karena pembelajaran MBKM dilakukan secara online. Persepsi mahasiswa terhadap indikator teknis dalam pembelajaran MBKM positif; yaitu mereka tidak mengalami masalah sinyal, sinyal di daerah tersebut lancar, dan dapat mengakses pembelajaran MBKM dengan mudah.

## 5. KESIMPULAN

Program Studi Independen merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang sukses dilaksanakan pada tahun 2021. Program ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan para mahasiswa dalam menghubungkan pendidikan dengan dunia kerja. Dengan program ini, para mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan, keahlian, dan pengalaman yang bermanfaat untuk masa depan. Program Studi Independen menekankan pentingnya pengetahuan dan penerapan potensi mahasiswa. Aktivitas yang dilakukan dalam program ini meliputi mengajar, pelatihan intensif, praktik, dan ujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program studi independen telah berjalan dengan baik, dan para mahasiswa telah memperoleh pengalaman berharga untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan konsep merdeka belajar dan kampus merdeka serta kebijakan studi independen dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Implementasi kebijakan ini memiliki beberapa tantangan, namun mayoritas mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap kebijakan ini, serta bertujuan untuk memberdayakan mahasiswa agar lebih mandiri dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri mereka. Melalui program Merdeka Belajar, mahasiswa diberi kebebasan untuk merancang dan mengatur kegiatan studi independen mereka sendiri, sehingga mereka dapat mengambil inisiatif dan bertanggung jawab penuh atas pendidikan mereka.

Kebijakan studi independen mendorong fleksibilitas dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih mata kuliah, membangun jalur studi mereka sendiri, dan bahkan menentukan tempat dan waktu pembelajaran. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengikuti minat dan kebutuhan mereka sendiri, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam proses belajar. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga berperan dalam menyediakan dukungan akademik dan mentorship kepada mahasiswa dalam menjalankan kegiatan studi independen mereka. Dukungan ini meliputi fasilitas, sumber daya, dan bimbingan dari dosen atau pengajar yang kompeten. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa mahasiswa memperoleh bimbingan yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka.

Dengan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengatur kegiatan studi independen, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Mahasiswa dapat lebih fokus pada minat mereka, mengembangkan keterampilan khusus, dan mendapatkan pengalaman praktis yang relevan dengan dunia kerja. Hal ini dapat meningkatkan daya saing lulusan dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri. Secara keseluruhan, kebijakan publik Kemenristek terkait Merdeka Belajar dan

Kampus Merdeka dalam kegiatan studi independen bertujuan untuk memberdayakan mahasiswa, mendorong fleksibilitas dalam pembelajaran, menyediakan dukungan akademik, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pendekatan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan berkontribusi secara positif dalam pembangunan negara.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka adalah sebagai berikut: (1) Kebanyakan mahasiswa terlalu fokus pada pembelajaran akademik dan mengabaikan pengembangan *soft skills*. Padahal, dalam dunia kerja, *soft skills* seperti kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bekerja sama dengan orang lain juga sangat penting. (2) Kurikulum pendidikan formal belum memperhitungkan pengembangan *soft skills* dalam pembelajarannya, sehingga mahasiswa kesulitan untuk mengembangkan keterampilan tersebut dalam lingkungan kelas. (3) Mahasiswa seringkali kebingungan dalam melakukan studi independen karena kurangnya panduan atau informasi yang tersedia. Akibatnya, mereka tidak dapat mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh hasil yang maksimal. (4) Meskipun konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah dicanangkan, namun belum semua Perguruan Tinggi memberikan dukungan yang cukup untuk mendorong pengembangan *soft skills* mahasiswa melalui studi independen. (5) *Soft skills* lebih sulit untuk diukur secara objektif dibandingkan dengan keterampilan akademik. (6) Pengembangan *soft skills* di luar kelas melalui studi independen seringkali dianggap sebagai hal yang terpisah dari pembelajaran formal di kelas, sehingga dibutuhkan upaya untuk mengintegrasikan pengembangan *soft skills* ke dalam kurikulum pendidikan formal agar mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan tersebut secara efektif. (7) Mahasiswa memiliki perbedaan dalam kemampuan, minat, dan motivasi dalam melakukan studi independen. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang berbeda-beda untuk membantu setiap mahasiswa

mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. (8) Mahasiswa mungkin mengembangkan keterampilan melalui studi independen yang tidak selaras dengan keterampilan yang diajarkan di kelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengintegrasikan hasil belajar dari studi independen dengan hasil belajar dari pembelajaran formal di kelas agar mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan dengan baik.

Meskipun demikian, kendala-kendala yang ditemukan perlu diperbaiki agar program SI dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan dievaluasi dengan hasil yang lebih terukur di masa depan. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmaliyah, S. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Sebagai Sarana Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Vokasi*
- Amaliah, I., & Hidayat, A. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Keterampilan Mahasiswa dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, 10(1), 29-36
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2021). *Kampus Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses pada 8 April 2023.
- Hidayatulloh, A. (2020). Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Dampaknya pada Kemampuan Belajar Mandiri dan Soft Skills Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancaran Pendidikan*, 9(1), 1-12.
- Junaidi, A., & dkk. (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta.
- Kurniawan, B., & Wuryanto, A. (2020). The Effectiveness of Independent Study Policy on Academic Achievement: Evidence from Merdeka Belajar Kampus Merdeka Policy. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(2), 267-282.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pramono, S. E., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Program Kampus Merdeka terhadap Soft Skills Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 10(1), 83-93.
- Purnomo, H., & Hadiyanti, Y. (2020). Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi: tantangan dan harapan. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(3), 619-634



- Purwanto, A., Sulistyadi, E., & Yulianto, A. (2021). Students' Perception of Campus Merdeka Independent Study Policy. *Journal of Educational Sciences*, 5(1), 8-15
- Rhorom, F. F., Arifin, A. S., & Al Idrus, S. (2020). The Impact of Campus Independent Learning Policy on Student's Skills Development. *Journal of Physics: Conference Series*, 1477(1), 012067
- Widiastuti, N. P., Prasetyo, Z. K., & Supartono, T. (2021). Studi Independen dalam Pembelajaran Merdeka Belajar di Kampus Merdeka. *Jurnal Pendidikan*.

## **BAB II**

# **PERAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI PERGURUAN TINGGI**

Sak Khie  
Universitas Islam Nusantara, Bandung  
smart.learningcenter007@gmail.com

### **1. PENDAHULUAN**

Kebijakan publik merujuk pada keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatur dan mengarahkan tindakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik melibatkan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan yang bersifat kolektif dan mempengaruhi masyarakat secara luas. Dalam sektor pendidikan, kebijakan publik memiliki peranan yang sangat penting, mengingat pendidikan merupakan hal yang vital bagi pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa kebijakan publik berperan penting dalam sektor pendidikan:

- a) Kebijakan publik dapat memberikan dukungan finansial dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Kebijakan yang tepat dapat mengurangi kesenjangan dalam kesempatan pendidikan antara kelompok yang berbeda, seperti kelompok miskin, perempuan, dan kelompok minoritas.
- b) Kebijakan publik dapat mengarah pada pengembangan kurikulum yang relevan, pembaruan metode pengajaran,

pelatihan guru yang efektif, dan pengadaan sumber daya pendidikan yang memadai. Melalui kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah dapat memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memiliki standar yang tinggi dan sesuai dengan tuntutan zaman.

- c) Kebijakan publik memungkinkan pemerintah untuk menetapkan prioritas dalam sektor pendidikan, baik dalam hal pengembangan pendidikan formal maupun nonformal. Kebijakan ini dapat mengarahkan sumber daya dan upaya menuju area-area yang dianggap paling penting untuk pembangunan pendidikan, seperti pendidikan inklusif, pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika), atau pendidikan vokasional.
- d) Kebijakan publik dapat memberikan kerangka kerja dan insentif untuk inovasi dalam pendidikan, baik dalam hal penggunaan teknologi, pengembangan model pembelajaran baru, atau kolaborasi antara lembaga pendidikan dan sektor industri. Dengan memfasilitasi inovasi, kebijakan publik dapat membantu pendidikan mengikuti perkembangan global dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan.

## **2. PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) adalah sebuah kebijakan di pendidikan tinggi di Indonesia yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa dalam mengakses pendidikan tinggi yang inovatif, relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dan memperkuat kewirausahaan.

Kehadiran program MBKM dapat dikaitkan dengan beberapa faktor dan tujuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Beberapa kondisi yang mendorong munculnya program MBKM adalah sebagai berikut.

- a) *Penyesuaian dengan Tantangan Global.* Perguruan tinggi perlu beradaptasi dengan tantangan dan perubahan yang terjadi di tingkat global. Program MBKM dirancang untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang relevan dengan tuntutan global saat ini.
- b) *Peningkatan Kualitas Pendidikan.* Program MBKM bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi dengan memberikan fleksibilitas dan akses yang lebih luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi tambahan di luar kurikulum formal. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap dan kompeten dalam menghadapi dunia kerja.
- c) *Kurikulum yang Relevan dengan Dunia Kerja.* Program MBKM mencoba mengurangi kesenjangan antara kurikulum perguruan tinggi dan kebutuhan industri dengan memperluas peluang mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis, magang, atau proyek penelitian di luar kampus. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan praktis dan kemampuan lulusan dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.
- d) *Meningkatkan Kewirausahaan dan Inovasi.* Program MBKM juga mengutamakan pengembangan kewirausahaan dan inovasi di kalangan mahasiswa. Melalui program ini, mahasiswa didorong untuk mengembangkan ide-ide kreatif, kewirausahaan, dan potensi inovatif mereka. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak peluang lapangan kerja melalui wirausaha baru dan kontribusi inovatif mereka di berbagai sektor.

Selain itu, program MBKM juga bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara dunia pendidikan (perguruan tinggi) dan industri. Kesenjangan ini merujuk pada perbedaan antara apa yang diajarkan di perguruan tinggi dan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau industri. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut.

*Pertama*, kurikulum yang tidak selaras. Kurikulum perguruan tinggi mungkin terlalu teoritis dan tidak memperhitungkan kebutuhan praktis yang diperlukan di dunia kerja. Hal ini dapat menyebabkan mahasiswa kurang siap menghadapi tantangan pekerjaan yang sesungguhnya setelah lulus.

*Kedua*, keterampilan praktis yang kurang. Beberapa program studi di perguruan tinggi mungkin tidak fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dibutuhkan di industri. Mahasiswa mungkin memiliki pengetahuan teoritis yang baik, tetapi kurangnya keterampilan praktis seperti pemecahan masalah, kerja tim, keterampilan komunikasi, dan pemahaman bisnis dapat menjadi hambatan dalam dunia kerja.

*Ketiga*, rendahnya koneksi antara perguruan tinggi dan industri: Kurangnya koneksi dan kerjasama antara perguruan tinggi dan industri juga dapat menyebabkan kesenjangan. Perguruan tinggi yang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan industri mungkin tidak sepenuhnya memahami kebutuhan dan tuntutan industri saat ini.

Terkait dengan hal ini, beberapa penelitian juga menunjukkan temuan serupa terhadap adanya kesenjangan tersebut, misalnya:

- a) *European Commission. (2018). The European Skills Index: A tool for understanding skills mismatches and trends in the EU.* Penelitian yang dilakukan oleh European Commission menemukan adanya kesenjangan keterampilan di Uni Eropa. Penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat ketimpangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan yang ada di dunia kerja.

- b) *World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020.* Laporan World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di perguruan tinggi dan kebutuhan keterampilan di pasar kerja. Laporan ini menekankan perlunya penyesuaian kurikulum dan pendekatan pendidikan yang lebih berorientasi pada keterampilan yang relevan dengan masa depan.
- c) *Malaysian Employers Federation. (2019). Graduates' Employability Survey Report Malaysia 2018.* Survei yang dilakukan oleh Malaysian Employers Federation (MEF) di Malaysia menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara keterampilan lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Survei ini menggarisbawahi pentingnya mengembangkan keterampilan yang lebih praktis dan relevan dengan pasar kerja.

### **3. TUJUAN DAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM MBKM**

Keberadaan program MBKM memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam mengatur jalur pendidikan mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia kerja dengan lebih baik. Secara umum, beberapa tujuan utama program MBKM adalah sebagai berikut.

*Pertama*, program ini dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang geografis, ekonomi, atau sosial. Dengan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah, mengakumulasi kredit, dan mengikuti program pengembangan diri, diharapkan bahwa lebih banyak individu dapat memperoleh pendidikan tinggi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.

*Kedua*, program ini meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui partisipasi dalam magang, pengalaman praktik, dan pengembangan keterampilan profesional, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam pasar kerja, memperkuat koneksi antara perguruan tinggi dan industri, serta mempersiapkan diri untuk karir yang sukses.

*Ketiga*, mendorong kemandirian belajar dan pengembangan diri. Program MBKM mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian belajar, mengambil tanggung jawab atas pendidikan mereka, dan menggali minat dan potensi diri secara lebih luas. Melalui kebebasan dalam memilih mata kuliah lintas disiplin, program pengembangan diri, dan kegiatan ekstrakurikuler, mahasiswa dapat menggali minat mereka, mengembangkan keahlian tambahan, dan mengasah keterampilan non-akademik.

Berikutnya, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan. Dengan memberikan kebebasan dalam merancang jalur pendidikan, program ini mendorong perguruan tinggi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan mahasiswa. Diharapkan bahwa dengan adanya fleksibilitas ini, perguruan tinggi akan terdorong untuk melakukan inovasi dalam pengajaran, meningkatkan kualitas kurikulum, dan meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, MBKM memiliki beberapa komponen kebijakan utama, antara lain:

- a) *Pilihan Kurikulum yang Fleksibel*. MBKM memberikan mahasiswa kebebasan untuk memilih mata kuliah yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di berbagai program studi dan bahkan di luar institusi pendidikan mereka.

- b) *Kewirausahaan dan Magang*. Kebijakan MBKM mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat kewirausahaan dan kerjasama dengan dunia industri melalui program magang, inkubator bisnis, dan kerjasama riset dengan sektor industri.
- c) *Pembelajaran Seumur Hidup*. MBKM juga mengedepankan pendekatan pembelajaran seumur hidup, di mana individu tidak hanya mendapatkan pendidikan formal di perguruan tinggi, tetapi juga terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui berbagai bentuk pembelajaran, seperti kursus online, pelatihan, dan sertifikasi.

Adapun dasar hukum untuk pelaksanaan program MBKM tercantum dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 36A). Pasal ini memberikan landasan bagi pengembangan pendidikan tinggi yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 52 ayat (3)). Pasal ini menyebutkan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia harus berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing global.
- c) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Pasal 46). Pasal ini menyebutkan bahwa pengembangan keahlian mahasiswa dalam program pendidikan tinggi harus mendorong inovasi dan kreativitas, serta menciptakan kemandirian belajar dan pengembangan diri.



- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Merdeka Belajar (Pasal 3). Peraturan ini menjadi dasar program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah, mengakumulasi kredit, mendapatkan pengalaman praktik, dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan diri di dalam dan di luar perguruan tinggi.
- e) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Pasal 87). Pasal ini menjelaskan bahwa perguruan tinggi harus mendorong mahasiswa untuk aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar.

#### **4. PERAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI PERGURUAN TINGGI**

##### **4.1 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengembangan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi**

Program MBKM dirancang untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Program ini memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang terkait dengan kewirausahaan dan pengembangan usaha. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang fokus pada pengembangan keterampilan kewirausahaan seperti perencanaan bisnis, pemasaran, manajemen keuangan, dan inovasi. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola usaha mereka sendiri.

Program MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, seperti magang, pembuatan bisnis plan, atau pengembangan startup. Mahasiswa pun memperoleh kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis di luar lingkungan akademik. Melalui magang, kegiatan praktis, atau proyek penelitian, mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks nyata. mahasiswa dapat belajar langsung tentang kewirausahaan, mengamati praktik bisnis, dan berinteraksi dengan para pengusaha. Magang juga dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide bisnis mereka sendiri atau bahkan memulai usaha sambil masih kuliah. Hal ini membantu mereka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia bisnis dan kewirausahaan.

Begitupula dengan kepesertaan mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan di luar kurikulum akademik. Mahasiswa dapat mengikuti kompetisi bisnis, konferensi kewirausahaan, atau menjadi anggota kelompok studi kewirausahaan di perguruan tinggi mereka. Ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan, wawasan, dan jaringan yang relevan dalam dunia kewirausahaan.

Terkait dengan aspek kolaborasi, melalui program MBKM, perguruan tinggi dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan, lembaga riset, atau komunitas bisnis untuk mendukung pengembangan kewirausahaan. Perusahaan dapat memberikan pendanaan atau investasi kepada mahasiswa atau tim mahasiswa yang memiliki ide bisnis potensial. Melalui program ini, perusahaan dapat memberikan dana awal, mentorship, dan akses ke jaringan bisnis mereka. Dalam beberapa kasus, perusahaan juga dapat mengambil bagian kepemilikan dalam usaha tersebut.

Berikutnya, bentuk kolaborasi antara perguruan tinggi dengan perusahaan dapat berupa pusat inovasi atau inkubator bisnis di kampus. Pusat ini menyediakan ruang kerja, fasilitas, dan dukungan teknis untuk mahasiswa yang tertarik memulai bisnis mereka sendiri. Perusahaan dapat

memberikan mentorship, bimbingan, dan akses ke sumber daya mereka kepada mahasiswa yang terlibat dalam inkubator bisnis.

Selanjutnya terkait dengan pembinaan dan pelatihan, perusahaan dapat memberikan pelatihan kewirausahaan kepada mahasiswa melalui seminar, workshop, atau program pelatihan khusus. Perusahaan tersebut dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis dalam memulai dan mengelola bisnis. Ini membantu mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek kewirausahaan dan meningkatkan peluang keberhasilan mereka dalam berbisnis di masa depan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah jaringan dan koneksi. Kolaborasi dengan perusahaan swasta dapat memberikan akses kepada mahasiswa ke jaringan bisnis yang luas. Mahasiswa dapat berinteraksi dengan para profesional, pengusaha, dan pelaku industri melalui kegiatan yang diselenggarakan bersama atau melalui mentorship yang diberikan oleh para praktisi bisnis. Jaringan ini dapat membantu mahasiswa membangun hubungan yang berharga dan mendapatkan peluang bisnis yang lebih baik.

Begitu pula halnya dengan dukungan keuangan kepada mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kewirausahaan. Dukungan ini dapat berupa beasiswa, bantuan pendanaan untuk pengembangan bisnis, atau penghargaan bagi mahasiswa yang mencapai prestasi dalam bidang kewirausahaan. Dukungan keuangan ini membantu mendorong motivasi dan minat mahasiswa dalam mengembangkan kewirausahaan.

#### **4.2 Peran Kebijakan Publik dalam Pengembangan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi**

Kebijakan publik memiliki peran penting dalam pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi. Kebijakan publik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi. Hal ini mencakup penyediaan dukungan keuangan,

pembentukan inkubator bisnis, akses ke mentor dan sumber daya lainnya, serta fasilitasi kolaborasi dengan industri dan lembaga riset. Kebijakan publik juga dapat memfasilitasi kerjasama antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mendukung kegiatan kewirausahaan.

Lebih lanjut, kebijakan publik dapat mendorong integrasi kewirausahaan dalam kurikulum perguruan tinggi. Hal ini termasuk pengembangan mata kuliah dan program khusus yang mempelajari aspek kewirausahaan, pembentukan pusat kewirausahaan di perguruan tinggi, dan penyediaan sertifikasi atau program pendidikan lanjutan dalam bidang kewirausahaan. Kebijakan publik juga dapat memberikan pedoman dan standar untuk mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum. Tersedianya dukungan kebijakan publik, memungkinkan perguruan tinggi dapat menjalin kemitraan strategis dengan pihak eksternal untuk mengembangkan program kewirausahaan, memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi, serta mendukung pengembangan bisnis startup oleh mahasiswa dan alumni perguruan tinggi.

Selain itu, kebijakan publik dapat memfasilitasi pemberian dukungan keuangan dan insentif bagi perguruan tinggi dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. Dukungan ini dapat berupa penyediaan dana hibah untuk riset dan pengembangan, pemberian beasiswa atau pendanaan khusus untuk pengembangan bisnis startup, dan insentif pajak atau perlakuan khusus lainnya bagi perguruan tinggi yang aktif dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan.

Melalui keterkaitan antara kebijakan publik dan kewirausahaan di perguruan tinggi, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan keterampilan berwirausaha, inovasi, dan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan lembaga riset.

#### 4.3 Peran Kebijakan Publik terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengembangan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi

Program MBKM adalah salah satu kebijakan publik yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Berdasarkan uraian di atas, peran kebijakan publik terhadap program MBKM dan pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- a) *Pembentukan Kebijakan dan Regulasi.* Kebijakan publik berperan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi, termasuk program MBKM. Melalui kebijakan ini, pemerintah menetapkan kerangka kerja yang jelas dan memberikan arahan tentang dukungan, insentif, dan aturan yang berlaku bagi perguruan tinggi dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan.
- b) *Pemberian Insentif dan Dukungan Keuangan.* Kebijakan publik dapat memberikan dukungan keuangan dalam bentuk hibah, beasiswa, dan pendanaan khusus untuk mendukung program MBKM dan kegiatan kewirausahaan di perguruan tinggi. Dukungan keuangan ini dapat membantu dalam pengembangan bisnis startup, pengadaan fasilitas, pelatihan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kewirausahaan.
- c) *Pendorong inklusi kewirausahaan dalam kurikulum perguruan tinggi.* Kebijakan publik dapat mendorong integrasi mata kuliah kewirausahaan ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Ini dapat membantu mahasiswa mendapatkan pemahaman tentang konsep bisnis, pengembangan produk, manajemen keuangan, pemasaran, dan keterampilan kewirausahaan lainnya.

- d) *Penyediaan fasilitas dan ruang kerja.* Kebijakan publik dapat mendorong pendirian inkubator bisnis dan ruang kerja kolaboratif di perguruan tinggi. Fasilitas ini menyediakan tempat bagi mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan ide-ide bisnis mereka, mendapatkan mentorship, dan berkolaborasi dengan orang-orang dengan minat serupa.
- e) *Fasilitasi Kolaborasi dengan Industri.* Kebijakan publik dapat memfasilitasi kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri dalam rangka pengembangan kewirausahaan. Hal ini dapat melibatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, penyediaan mentorship oleh praktisi industri, akses ke fasilitas dan sumber daya industri, serta peluang magang dan penempatan kerja bagi mahasiswa.
- f) *Pemantauan dan Evaluasi.* Kebijakan publik dapat melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program MBKM dan pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi. Evaluasi ini membantu pemerintah dalam memahami efektivitas kebijakan, mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan, serta memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan lebih lanjut.

## 5. TANTANGAN IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM

Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dihadapkan pada sejumlah tantangan dan hambatan. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

- a) *Perubahan Budaya dan Paradigma.* Implementasi MBKM memerlukan perubahan budaya dan paradigma dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi harus beradaptasi dengan pendekatan baru yang memberikan

kebebasan dan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam menentukan jalur pendidikan mereka. Perubahan ini membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dan dosen.

- b) *Infrastruktur dan Sumber Daya.* Pelaksanaan MBKM memerlukan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, termasuk teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, pusat sumber daya pembelajaran, dan fasilitas pendukung lainnya. Beberapa perguruan tinggi mungkin perlu melakukan investasi tambahan untuk memperbarui dan meningkatkan infrastruktur mereka agar sesuai dengan kebutuhan MBKM.
- c) *Kesadaran dan Partisipasi Mahasiswa.* Suksesnya implementasi MBKM sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif mahasiswa. Mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang baik tentang program ini, termasuk manfaatnya dan bagaimana memanfaatkannya secara optimal. Tantangan ini mungkin terkait dengan komunikasi yang efektif dan promosi program MBKM kepada mahasiswa.
- d) *Koordinasi dan Kolaborasi antara Perguruan Tinggi.* MBKM mengharuskan perguruan tinggi untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelenggarakan program ini. Tantangan ini melibatkan koordinasi antara perguruan tinggi yang terlibat, termasuk pengakuan dan transfer kredit mata kuliah, pengembangan program pengembangan diri, dan pembagian sumber daya. Kolaborasi yang efektif dan saling pengertian antara perguruan tinggi sangat penting untuk mencapai tujuan MBKM.

Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu mengatasi hambatan dalam implementasi MBKM. *Pertama*, sosialisasi dan komunikasi yang efektif. Penting untuk melakukan sosialisasi yang intensif dan komunikasi yang efektif kepada semua pihak terkait, termasuk mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya. Penjelasan yang jelas mengenai tujuan, manfaat, dan proses implementasi MBKM akan membantu mengurangi ketidakpastian dan memperoleh dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

*Kedua*, dukungan dan sumber daya yang memadai. Pemerintah dan perguruan tinggi perlu menyediakan dukungan dan sumber daya yang memadai untuk implementasi MBKM. Ini termasuk dukungan keuangan, fasilitas pendukung, dan akses ke teknologi dan sumber belajar yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran fleksibel dan pengembangan kewirausahaan.

*Ketiga*, pelatihan dan peningkatan kapasitas. Dosen dan staf perguruan tinggi perlu mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait dengan pendekatan pembelajaran baru, pengembangan kurikulum fleksibel, dan pendampingan kewirausahaan. Pelatihan ini akan membantu mereka dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan pendidikan dan mendorong inovasi dalam metode pengajaran.

*Keempat*, kerjasama dan kolaborasi antar institusi. Perguruan tinggi dapat saling berkolaborasi dan berbagi sumber daya untuk meningkatkan akses dan keberagaman dalam penawaran mata kuliah dan pengalaman pembelajaran. Kerjasama ini dapat melibatkan pertukaran mahasiswa, pengembangan program studi bersama, atau pembentukan jaringan kerja sama antar perguruan tinggi.



*Kelima*, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi MBKM dan memperbaiki kebijakan serta praktik yang tidak efektif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, dapat diidentifikasi hambatan yang masih ada dan ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

*Keenam*, pengaturan dan kebijakan yang mendukung. Pemerintah perlu mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang mendukung implementasi MBKM, seperti peraturan tentang pengakuan kredit transfer, pemberian insentif bagi perguruan tinggi yang aktif dalam mengembangkan program MBKM, dan peningkatan kerjasama antara perguruan tinggi dan sektor industri.

## **6. KESIMPULAN**

Secara garis besar, program MBKM bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kewirausahaan, memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa, dan mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal dalam rangka mewujudkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Dalam hal ini, kebijakan publik memainkan peran penting dalam program MBKM untuk membangun jiwa kewirausahaan di perguruan tinggi. Melalui kebijakan publik, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kewirausahaan di perguruan tinggi, menghilangkan hambatan birokrasi, dan mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan komunitas bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., & Wicaksono, I. (2020). Implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Policy in Higher Education: Policy Paradigm Shift in Indonesia. *Journal of Educational Sciences*, 4(1), 72-80.
- Arun-Kumar, A., & Manikandan, P. (2019). Bridging the Gap between Industry and Academia: A Comparative Study on the Skill Expectation of Engineering Graduates. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(2), 2220-2231.
- Chaminade, C., & Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2016). Entrepreneurship and public policy in the European Union. *Small Business Economics*, 47(1), 1-9.
- European Commission. (2018). The European Skills Index: A tool for understanding skills mismatches and trends in the EU. Retrieved from: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78fbd13a-2c95-11e8-b5fe-01aa75ed71a1>.
- European Commission. (2021). Entrepreneurship education in Europe: Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning. Retrieved from: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/11a6592e-f1>.
- Fatmaningrum, D., Irawan, R., & Arisandi, A. F. (2021). The Role of Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program to Improve the Quality of Higher Education in Indonesia. *International Journal of Educational Technology and Vocational Education*, 2(2), 49-56. Retrieved from: <https://doi.org/10.29100/ijete.v2i2.2807>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2020). Pedoman Umum Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Retrieved from: <https://mbkm.kemdikbud.go.id/media/file/2020/06/07/pedoman-umum-mbkm-revisi.pdf>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Retrieved from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135448/permenristekdikti-no-6-tahun-2020>.

- Kurniawan, A. (2021). Merdeka Belajar: Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi dalam Rangka Persaingan Global. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 6(2), 263-269.
- Malaysian Employers Federation. (2019). Graduates' Employability Survey Report Malaysia 2018. Retrieved from: <https://www.mef.org.my/wp-content/uploads/2019/06/Graduates-Employability-Survey-Report-Malaysia-2018.pdf>.
- Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia. (2019). Policy Brief: The Role of Higher Education Institutions in Developing Entrepreneurial Ecosystem. Retrieved from: [http://publikasi.dikti.go.id/uploaded\\_files/temporary/DNmrAg.pdf](http://publikasi.dikti.go.id/uploaded_files/temporary/DNmrAg.pdf).
- Oktaviani, R. (2019). The role of public policy in fostering entrepreneurship education in higher education institutions. In *Proceedings of the 6th International Conference on Community Development* (p. 49). Atlantis Press.
- Prastowo, A. (2021). Kampus Merdeka Program in Higher Education in Indonesia. In *The 7th International Conference on Community Development* (pp. 19-24). Atlantis Press.
- Şahin, C. (2018). Skills Gap in Higher Education: The Role of Graduate Attributes. *International Journal of Contemporary Educational Research*, 5(1), 101-112.
- Shabbir, A., & Parveen, N. (2020). Role of Public Policy in Education Sector in Pakistan. *Journal of Public Affairs and Social Policy*, 14(2), 60-73.
- UNESCO. (2015). Education for All Global Monitoring Report 2015: Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges. T Retrieved from: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233718>
- Wardhani, R. S., & Yudhanto, E. (2020). The Challenges of Higher Education to Produce Competitive Graduates in the Industrial Revolution Era 4.0. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(3), 1077-1086.
- World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. Retrieved from: [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_Future\\_of\\_Jobs\\_2020.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf).
- World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. Retrieved from: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28340/9/781464810961.pdf>.

# **BAB III**

## **KEBIJAKAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PENINGKATAN SOFT SKILLS MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA**

Agung Hardianto Wibowo  
Universitas Islam Nusantara, Bandung  
agoeng.wibowo@gmail.com

### **1. PENDAHULUAN**

Era Revolusi Industri 4.0, yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital dan otomasi yang pesat, memberikan tantangan dan peluang baru bagi individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk menghadapi era ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil yang pertama adalah pendidikan dan pembelajaran Berkelanjutan berarti mengikuti perkembangan teknologi dan tren di era Revolusi Industri 4.0, sangat penting untuk melanjutkan pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini bisa dengan mengikuti kursus online, pelatihan profesional, sertifikasi, atau bahkan mengambil gelar lanjutan. Peningkatan kompetensi teknologi dan digital, serta pengembangan *soft skills* seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan kepemimpinan, akan menjadi penting dalam menghadapi perubahan yang cepat.

Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan juga menjadi perhatian utama. Perusahaan dan individu perlu mampu untuk dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di dunia kerja. Hal ini termasuk pengembangan fleksibilitas, adaptabilitas, dan kemampuan untuk mempelajari keterampilan baru. Selain itu, perusahaan juga harus

mempertimbangkan restrukturisasi dan transformasi operasional mereka untuk memanfaatkan teknologi digital dan otomasi. Revolusi Industri 4.0 erat kaitannya dengan digitalisasi kehidupan. Keterampilan digital menjadi semakin penting di era Revolusi Industri 4.0. Menguasai teknologi seperti analisis data, kecerdasan buatan, pemrograman, desain antarmuka pengguna, dan manajemen sistem informasi akan memberikan keunggulan kompetitif. Perusahaan dapat memberikan pelatihan internal atau menggandeng lembaga pendidikan untuk mengembangkan keterampilan digital karyawan mereka.

Menjadi unggul serta memenangkan kompetisi di era ini memerlukan kemitraan dan Kolaborasi yang baik. Kolaborasi antara individu, perusahaan, dan institusi pendidikan atau penelitian menjadi kunci dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Melalui kemitraan strategis, dapat dilakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, penelitian bersama, pengembangan produk atau layanan baru, serta penciptaan ekosistem inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Perubahan teknologi yang cepat dalam era Revolusi Industri 4.0 memerlukan adanya pemahaman dan penyesuaian hukum dan kebijakan yang relevan. Hal ini meliputi kebijakan perlindungan data, regulasi tentang kecerdasan buatan, etika dalam penggunaan teknologi, dan penyesuaian kebijakan pendidikan dan pelatihan. Pemahaman kontekstual dan pengelolaan risiko menjadi penting di era yang menghadirkan risiko baru ini, seperti keamanan siber, pengangguran struktural, dan ketimpangan ekonomi. Penting bagi individu dan perusahaan untuk memahami risiko ini dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengelolanya. Ini dapat melibatkan investasi dalam keamanan siber, diversifikasi keterampilan.

Pada saat yang bersamaan, Indonesia sedang menghadapi masa-masa pentingnya, menjelang ulang tahun kemerdekaannya yang ke 100, tahun 2045 nanti. Indonesia mendapatkan peluang era demografi bonus. Demografi bonus adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan

situasi di mana sebagian besar populasi suatu negara berada dalam rentang usia produktif (15-64 tahun). Di Indonesia, demografi bonus saat ini sedang terjadi dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2030-2040.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, populasi Indonesia sebesar 270 juta jiwa dengan proporsi usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 68,1% dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada pada periode demografi bonus yang akan memberikan potensi ekonomi dan pembangunan bagi Negara. Namun, potensi demografi bonus ini tidak akan terwujud secara otomatis. Indonesia harus memanfaatkan potensi ini dengan baik melalui berbagai program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan sektor ekonomi, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Jika dimanfaatkan dengan baik, demografi bonus dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Indonesia.

Untuk mengakselerasi proses persiapan generasi muda menghadapi era revolusi industri 4.0 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mencakup empat kebijakan utama, yaitu; (a) kemudahan pembukaan prodi baru; (b) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi; (c) kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum; dan (d) hak belajar tiga semester di luar prodi.

Bentuk kegiatan pembelajaran dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi meliputi pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, program kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi independen, membangun desa/kuliah kerja nyata (M. Pendidikan et al., 2013). Tujuan

diselenggarakannya program ini untuk meningkatkan kemampuan *softskills* dan *hardskills* lulusan perguruan tinggi sesuai kebutuhan masyarakat serta kelak siap menjadi pemimpin bangsa yang berkepribadian (Tohir, 2020). Pelaksanaan program MKBM diarahkan untuk mencapai tujuan berdasarkan indikator kerja utama. Tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 ialah tercapainya kemajuan yang pesat sebagaimana rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, serta kebijakan Kampus Merdeka (K. Pendidikan et al., 2021).

Program pertukaran mahasiswa telah menjadi salah satu sarana yang penting dalam meningkatkan kerjasama dan pemahaman lintas budaya antara negara-negara di seluruh dunia. Mengakui pentingnya pengalaman internasional dalam perkembangan pribadi dan akademik mahasiswa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia meluncurkan Kampus Merdeka, sebuah kebijakan inovatif yang bertujuan untuk mendorong mobilitas mahasiswa dan memperluas wawasan mereka melalui program pertukaran mahasiswa yang lebih inklusif dan terjangkau.

Kampus Merdeka adalah sebuah perubahan revolusioner dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam program ini, mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih mata kuliah, jurusan, dan kampus di mana mereka ingin belajar. Tujuan utama dari Kampus Merdeka adalah untuk melampaui batasan-batasan geografis dan institusional yang sering kali membatasi mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua mahasiswa Indonesia, terlepas dari latar belakang mereka, untuk mengakses pendidikan berkualitas di berbagai universitas di dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu aspek utama dari Kampus Merdeka adalah program pertukaran mahasiswa. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk menghabiskan satu atau dua semester di universitas mitra, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman akademik yang berbeda dan memperluas jaringan kontak mereka. Selama program pertukaran, mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar di lingkungan yang berbeda, menghadiri kuliah yang menarik, dan terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang unik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan mereka, tetapi juga akan membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, kemandirian, dan pemecahan masalah.

Selain itu, program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka juga berupaya untuk mengatasi kendala keuangan yang seringkali menjadi hambatan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti program serupa. Melalui dukungan keuangan dari pemerintah, universitas mitra, dan sumber daya lainnya, program ini memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat agar dapat mengurangi beban finansial mereka selama pertukaran.

Program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka juga bertujuan untuk membuka pintu kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di luar negeri, berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai negara, dan mengembangkan pemahaman lintas budaya yang mendalam. Dengan meningkatkan mobilitas mahasiswa, program ini diharapkan akan menciptakan generasi yang lebih berpengetahuan, berpengalaman, dan siap menghadapi tantangan global.

Program pertukaran pelajar berjalan dengan 7 tahap, Pertama, mahasiswa mendaftar untuk ikut dalam program ini, setelah itu mahasiswa mengikuti seleksi peserta. Langkah ketiga adalah pelaksanaan pertukaran pelajar, dilanjutkan dengan evaluasi dan penilaian. Langkah ke-enam adalah konversi nilai dan pengakuan SKS. Terakhir adalah laporan kepada PD Dikti.



Gambar 4 Alur Tahapan Program Pertukaran Pelajar



Pada era globalisasi yang semakin kompleks dan persaingan yang semakin ketat, keahlian atau skill yang dimiliki seseorang tidak hanya terbatas pada keahlian teknis atau *hard skills* saja, tetapi juga meliputi kemampuan interpersonal atau *soft skills*. *Soft skills* merupakan kemampuan yang berkaitan dengan cara berinteraksi dengan orang lain, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan berpikir kritis.

Peningkatan *soft skills* atau keterampilan lunak merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan karier. *Soft skills* mencakup berbagai kemampuan non-teknis yang meliputi komunikasi efektif, kerja tim, kepemimpinan, kreativitas, pemecahan masalah, adaptabilitas, keterampilan interpersonal, dan banyak lagi. *Soft skills* memiliki peran yang krusial dalam membantu individu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan kerja dan masyarakat yang semakin kompleks.

*Soft skills* sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja di tempat kerja serta mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. *Soft skills* juga menjadi faktor kunci dalam menjalin hubungan yang sehat dengan rekan kerja, pelanggan, dan komunitas di sekitar kita.

Ada beberapa alasan mengapa penting untuk mempercepat proses peningkatan *soft skills* diantaranya terkait dengan persaingan global. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, pasar kerja semakin kompetitif. Pemilik *soft skills* yang kuat memiliki keunggulan dalam memenuhi tuntutan pekerjaan yang terus berubah dan kompleks. Perusahaan mencari individu yang dapat beradaptasi dengan cepat, bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan baik, dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara kreatif.

*Soft skills* merupakan komplementer yang penting untuk keterampilan teknis dalam suatu pekerjaan. Banyak profesi modern memerlukan individu yang tidak hanya memiliki keahlian teknis, tetapi juga mampu berinteraksi dengan baik dengan rekan kerja, menunjukkan kepemimpinan yang efektif, mengelola konflik, dan bekerja dalam tim. Kemampuan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi di tempat kerja, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan positif.

Dalam era perubahan yang cepat, kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru dan menghadapi tantangan adalah kunci keberhasilan. Soft skills membantu individu mengembangkan fleksibilitas, adaptabilitas, dan resiliensi yang diperlukan untuk menghadapi perubahan dengan sikap yang positif. Ini juga membantu mereka berpindah antar peran dan tanggung jawab yang berbeda dengan mudah. *Soft skills* juga berdampak pada kesejahteraan pribadi dan kebahagiaan individu. Kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan baik, mengelola stres, dan memiliki kemampuan interpersonal yang baik dapat meningkatkan kepuasan dalam hidup sehari-hari dan hubungan sosial.

Namun, proses peningkatan *soft skills* seringkali memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan pengalaman serta latihan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk mempercepat proses peningkatan *soft skills* sangatlah penting, terutama di era digital yang semakin maju dan kompleks.

## 2. PERMASALAHAN

Dalam era yang semakin maju ini, mempercepat proses peningkatan soft skills menjadi sangat penting dan mendesak untuk meningkatkan produktivitas, kinerja, dan hubungan interpersonal yang sehat. Melalui berbagai upaya seperti pendidikan dan pelatihan, pengalaman dan praktik, kolaborasi dan mentorship, serta teknologi dan aplikasi digital, kita dapat mempercepat proses peningkatan soft skills dan meningkatkan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Mengingat pentingnya proses percepatan ini, dan hal ini menjadi kebutuhan mendasar bagi bangsa yang sedang menghadapi peluang besar bonus demografinya, maka kehadiran kebijakan publik yang dapat mengatur tata laksana program menjadi penting dan mendesak.

Namun secara umum Implementasi kebijakan program pertukaran mahasiswa Program Kampus Merdeka di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan, antara lain Keterbatasan Infrastruktur perguruan tinggi, kurangnya Kesadaran dan partisipasi, kendala administrasi dan birokrasi, keterbatasan anggaran dan masalah budaya dan bahasa.

Dalam tataran teknis perguruan tinggi menghadapi permasalahan dalam implementasi kebijakan diantaranya, desain kurikulum dan mekanisme pemberian SKS antar perguruan tinggi yang terkait, ketersediaan dosen pembimbing yang intensif berinteraksi dengan program di setiap perguruan tinggi, Ketersediaan program yang dapat ditawarkan dan keterbatasan pendanaan program MBKM.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti memilih ITB Swadharma sebagai lokasi penelitian, di samping ITB Swadharma salah satu institut yang menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga institusi ini telah memiliki pengalaman dalam implementasi kebijakan studi independen.

Teknik yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang terdiri dari dosen pembimbing, mahasiswa dan staf perguruan tinggi yang terlibat dalam implementasi kebijakan studi independen pada program MBKM. Wawancara dilakukan dengan panduan kuesioner terstruktur dan dilakukan baik secara tatap muka maupun daring. Sementara Observasi partisipatif dilakukan dalam pengamatan secara langsung proses pembelajaran dan interaksi antara mahasiswa dan dosen. Peneliti juga mengamati proses pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan studi independen di perguruan tinggi. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi

partisipatif dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan tema-tema yang muncul dari data peneliti menggunakan analisis tematik. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi data dari sumber yang berbeda, seperti dokumen kebijakan dan laporan evaluasi dari perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

#### **4. PEMBAHASAN**

Demografi bonus adalah istilah yang menggambarkan situasi di mana sebagian besar populasi suatu negara berada dalam rentang usia produktif. Di Indonesia, demografi bonus diperkirakan akan mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2030-2040, dengan sejumlah besar individu yang berada pada usia produktif.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa pada Juni 2022, Dari jumlah tersebut, ada 190,83 juta jiwa (69,3%) penduduk Indonesia yang masuk kategori usia produktif (15-64 tahun). Terdapat pula 84,53 juta jiwa (30,7%) penduduk yang masuk kategori usia tidak produktif. Rinciannya, sebanyak 67,16 juta jiwa (24,39%) penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan sebanyak 17,38 juta jiwa (6,31%) merupakan kelompok usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas).

Dengan komposisi jumlah penduduk tersebut di atas, maka rasio ketergantungan/beban tanggungan (dependency ratio) adalah sebesar 44,3%. Hasil tersebut diperoleh dari jumlah penduduk usia tidak produktif dibagi jumlah penduduk usai produktif. Angka ketergantungan sebesar 44,3%, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 44-45 jiwa penduduk usia produktif.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045, tepat saat Republik Indonesia berusia 100 tahun. Dalam laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, Kementerian PPN dan BPS memprediksi jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 318,96 juta jiwa pada 2045. Dari jumlah tersebut, penduduk usia produktifnya (15-64 tahun) diperkirakan mencapai 207,99 juta jiwa. Sedangkan penduduk usia tidak produktifnya diperkirakan mencapai 110,97 juta jiwa. Terdiri dari 44,99 juta penduduk usia sudah tidak produktif (di atas 65 tahun) dan 65,98 juta penduduk usia belum produktif (0-14 tahun).

Berdasarkan data tersebut, angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk Indonesia pada 2045 diperkirakan sebesar 53,35%, artinya 100 penduduk usia produktif menanggung beban 54 penduduk usia tidak produktif.

Menghadapi demografi bonus ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil.

- a) Investasi dalam Pendidikan: Mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan sangat penting. Pemerintah dan sektor pendidikan perlu berinvestasi dalam pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan yang baik akan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang terus berkembang;
- b) Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja: Meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah langkah penting untuk memanfaatkan potensi demografi bonus. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pengembangan kompetensi teknis dan keahlian, serta pengembangan soft skills seperti kreativitas,

kolaborasi, dan kepemimpinan. Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk menyediakan program pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;

- c) Mendorong Kewirausahaan dan Inovasi: Demografi bonus menciptakan peluang untuk meningkatkan kewirausahaan dan inovasi. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pengusaha muda dengan menyediakan akses ke modal, pelatihan, dan pendampingan. Selain itu, dukungan terhadap riset dan pengembangan serta kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah akan mendorong inovasi dan penciptaan lapangan kerja baru;
- d) Peningkatan Produktivitas: Dalam menghadapi demografi bonus, peningkatan produktivitas menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur, mempromosikan teknologi dan otomasi, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperkuat rantai pasok. Pemerintah perlu mendorong investasi di sektor-sektor yang dapat meningkatkan produktivitas, seperti teknologi informasi dan komunikasi, industri manufaktur, dan infrastruktur;
- e) Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial: Dalam menghadapi demografi bonus, perlu diperhatikan pula kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang memastikan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial bagi seluruh populasi. Ini akan membantu memastikan bahwa manfaat dari demografi bonus dapat dinikmati secara adil oleh semua lapisan masyarakat.

Indonesia sangat membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menghadapi demografi bonus ini. Keseriusan kerja semua elemen bangsa sangat menentukan apakah demografi bonus ini dapat menjadi anugrah atau justru musibah untuk bangsa yang besar ini, yaitu kondisi di mana peningkatan populasi tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas.

Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan kebijakan nasional yang dilaksanakan untuk menyiapkan intelektual muda yang unggul dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045 serta memastikan potensi bonus demografi tidak menjadi bencana demografi. Kebijakan tersebut perlu mengupayakan penguasaan ilmu pengetahuan, pengembangan ekonomi, serta penguasaan teknologi.

Implementasi Kurikulum Merdeka untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut ini:

a) Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022:

Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. SKL menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka.

b) Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022:

Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan: 1) muatan wajib sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan; 2) konsep keilmuan; dan 3) jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar isi menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat dan Kurikulum Merdeka.

- c) Permendikbudristek No. 262/M/2022:  
Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Memuat struktur Kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta beban kerja guru.
- d) Keputusan Kepala BSKAP No.008/H/KR/2022 Tahun 2022:  
Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, pada Kurikulum Merdeka. Memuat Capaian Pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur Kurikulum Merdeka.
- e) Keputusan Kepala BSKAP No.009/H/KR/2022 Tahun 2022:  
Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka. Memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan pelajar Pancasila.
- f) Surat Edaran No. 0574/H.H3/SK.02.01/2023:  
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses penyiapan intelektual muda yang unggul antara lain:

- a) Pendidikan dan Pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan terarah dapat membantu seseorang untuk mengembangkan soft skills-nya dengan lebih cepat. Sebuah program pelatihan yang efektif dapat membantu individu untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan mereka, memberikan umpan balik yang konstruktif, memberikan kesempatan untuk berlatih, dan meningkatkan kemampuan interpersonal mereka;
- b) Pengalaman dan Praktik. Praktik dan pengalaman langsung di bidang yang diinginkan juga dapat membantu mempercepat proses peningkatan soft skills. Melalui pengalaman ini, seseorang dapat belajar bagaimana menyelesaikan masalah, berkomunikasi dengan baik, dan menangani situasi yang kompleks dengan lebih efektif;
- c) Kolaborasi dan Mentorship. Kolaborasi dan mentorship juga merupakan cara yang efektif untuk mempercepat proses peningkatan soft skills. Melalui kolaborasi dengan orang lain dan mendapatkan masukan dan bimbingan dari mentor, individu dapat belajar dari pengalaman orang lain dan mempercepat proses pembelajaran mereka;
- d) Teknologi dan Aplikasi Digital Teknologi dan aplikasi digital juga dapat membantu mempercepat proses peningkatan soft skills. Beberapa aplikasi seperti aplikasi keterampilan interpersonal dan aplikasi pengembangan kepribadian, memberikan kesempatan untuk belajar dan berlatih kemampuan interpersonal secara mandiri dan fleksibel.

Untuk menciptakan SDM unggul Kemendikbud dalam kebijakannya membuat 8 indikator kinerja utama yang akan mendorong transformasi perguruan tinggi di Indonesia.

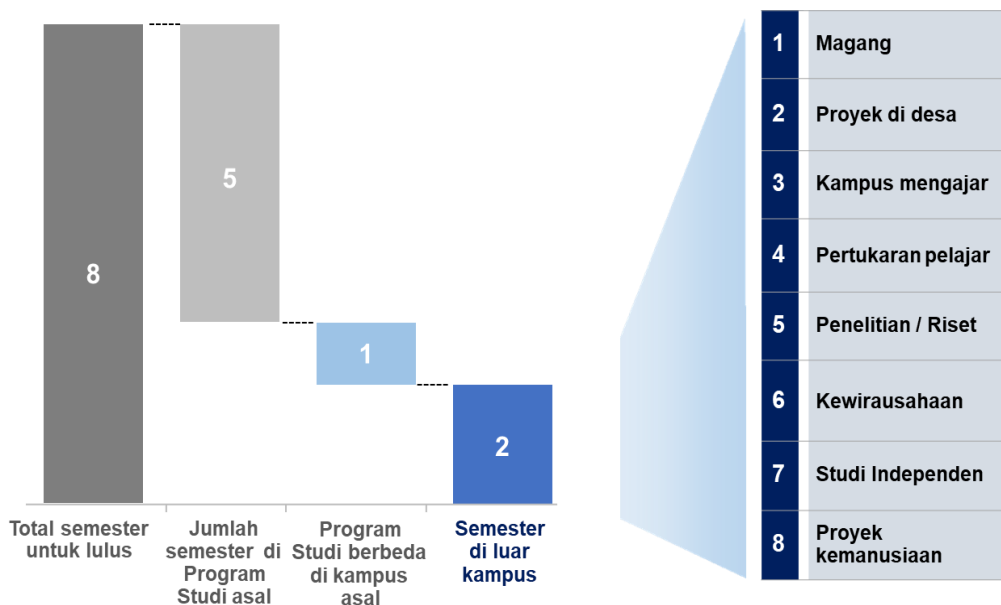
- a) Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, pekerjaan dengan upah di atas UMR, menjadi wirausaha, atau melanjutkan studi;
- b) Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus: magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, pertukaran pelajar;
- c) Dosen berkegiatan di luar kampus: mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain;
- d) Praktisi mengajar di dalam kampus: merekrut dosen dengan pengalaman industri;
- e) Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional dan hasil riset dan pengabdian yang dimanfaatkan;
- f) Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia dalam hal kurikulum, magang, dan penyerapan lulusan;
- g) Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, evaluasi dapat menggunakan metode studi kasus dan proyek kelompok;
- h) Program studi berstandar internasional dan memperoleh akreditasi tingkat internasional.

Dari delapan Indikator kinerja utama di atas, pemerintah meletakkan fokus utama kepada IKU nomer dua yaitu mendorong, memfasilitasi mahasiswa agar mendapat pengalaman di luar kampus yang meliputi delapan aktivitas yang dapat dilaksanakan mahasiswa selama 3 semester di luar prodinya. Pemerintah juga menyiapkan delapan aktivitas yang dapat dijadikan mahasiswa untuk dijadikan program pengayaan pengalamannya di luar kampus yaitu:

- a) Magang di perusahaan, organisasi nirlaba dan multilateral, lembaga pemerintahan, atau start-up;
- b) Proyek di desa: proyek sosial untuk membantu desa membangun ekonomi, menyelesaikan permasalahan infrastruktur, atau mengatasi masalah sosial;
- c) Kampus Mengajar: kegiatan mengajar di SD atau SMP, baik di daerah terpencil maupun perkotaan;
- d) Pertukaran Pelajar: mengambil kelas di perguruan tinggi lain;
- e) Penelitian/riset: melakukan penelitian, mulai dari penelitian sains hingga sosial, di bawah pengawasan dosen;
- f) Keiwhrausahaan: membangun dan mengembangkan bisnis mereka sendiri secara mandiri yang dibuktikan dengan adanya proposal bisnis, transaksi konsumen, atau slip gaji karyawan;
- g) Studi independen: mengembangkan proyek berdasarkan topik minat tertentu;
- h) Proyek kemanusiaan: aktivitas sosial yang didedikasikan untuk organisasi sosial lokal atau multinasional.

Terkait infrastruktur di beberapa perguruan tinggi bukan hanya masalah keterbatasannya namun juga standarisasinya. Program pertukaran mahasiswa membutuhkan fasilitas yang memadai, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas akomodasi bagi mahasiswa yang datang dari luar. Sayangnya infrastruktur tersebut saat ini masih kurang memadai, sehingga implementasi program pertukaran menjadi terhambat. Perlu ada kebijakan yang dapat menjadi solusi dari permasalahan infrastruktur ini.

Gambar 5 Delapan Program Pengayaan Mahasiswa di Luar Kampus



Kemendikbud dalam sosialisasinya terkait implementasi kebijakan Kampus Merdeka, Mei 2021 menyampaikan bahwa lebih dari 98 % para Mahasiswa, Dosen dan Pimpinan Perguruan Tinggi menganggap kebijakan kampus merdeka sangat bermanfaat bagi mahasiswa, namun demikian dalam perjalannya, Implementasi program pertukaran mahasiswa Program Kampus Merdeka di Indonesia ternyata menghadapi beberapa permasalahan, yang perlu dibuatkan kebijakan untuk menyelesaikannya.

Permasalahan pelaksanaan kebijakan kampus merdeka di antaranya terjadi pada keterbatasan Infrastruktur yang tersedia, kurangnya kesadaran dan partisipasi mahasiswa, kendala administrasi dan birokrasi, keterbatasan anggaran, serta masalah budaya dan bahasa yang cukup menghambat pencapaian tujuan dari kebijakan ini.

Selain masalah infrastruktur, sebenarnya ada permasalahan yang cukup dominan dapat menghambat implementasi kebijakan kampus merdeka ini yakni kesadaran tentang pentingnya program pertukaran

mahasiswa yang masih rendah di kalangan mahasiswa, perguruan tinggi, dan masyarakat secara umum. Kurangnya partisipasi dalam program pertukaran dapat membatasi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman internasional dan peningkatan keterampilan lintas budaya.

Implementasi program pertukaran mahasiswa tentu melibatkan proses administrasi dan birokrasi yang kompleks, termasuk dalam hal ini adalah persyaratan pendaftaran, pembuatan visa, dan pengakuan kredit. Kendala dalam hal ini, seperti proses yang rumit, kebijakan yang tidak jelas, atau kurangnya koordinasi antarlembaga termasuk belum adanya keseragaman dalam pengakuan kredit yang bias dilakukan di perguruan masing-masing, dapat menghambat kelancaran program pertukaran mahasiswa.

Permasalahan pendanaan menjadi batu sandungan dalam Program pertukaran mahasiswa yang sering kali memerlukan biaya yang cukup besar ini, termasuk dalam pendanaan ini adalah biaya perjalanan, biaya hidup dan akomodasi selama masa pertukaran. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam mengimplementasikan program ini secara luas dan turut mempengaruhi aksesibilitas bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang yang berbeda kemampuan pendanaannya.

Satu permasalahan lagi yang turut menyulitkan implementasi program pertukaran mahasiswa dalam program kampus merdeka ini adalah masalah budaya dan bahasa. Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran seringkali harus beradaptasi dengan budaya dan bahasa baru di negara tujuan mereka. Adanya perbedaan budaya, bahasa, dan sistem pendidikan dapat menjadi tantangan bagi mahasiswa, yang turut mempengaruhi pengalaman mereka dan membutuhkan dukungan yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan kebijakan untuk peningkatan kapasitas soft skill dan hardskill, sehingga turut memudahkan mahasiswa untuk melakukan mobilitasnya.

Dalam upaya memberikan solusi atas hambatan-hambatan utama bagi terselenggaranya kebijakan Kampus Merdeka seperti ketersediaan program di luar kampus, pendanaan dan pembaruan kampus, dan ketersediaan dosen pembimbing, Kemendikbud sudah menyediakan *enablers*-nya.

Permasalahan yang terjadi karena kurangnya ketersediaan program luar kampus, dibuatlah Program *Flagship* Kampus Merdeka: Kemendikbud menyelenggarakan 4 program *flagship* secara nasional yang terbuka untuk semua mahasiswa PTN/PTS. Semua mahasiswa yang partisipasi harus diberikan 20 SKS. Untuk permasalahan seputar pendanaan pemerintah menyediakan Beasiswa. LPDP menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang ingin mengikuti tiga program *flagships* Kampus Merdeka. Selain beasiswa tersebut pemerintah c.q. Kemendikbud memberikan Dana Kompetisi Kampus Merdeka untuk mendorong diferensiasi misi Perguruan Tinggi dan *Matching Fund* untuk mengakselerasi kemitraan Perguruan Tinggi.

Untuk menyelesaikan permasalahan pembaruan kurikulum kemedikbud mengeluarkan keputusan menteri sebagai acuan kebijakan pengakuan 20-40 SKS untuk semua program *flagship* Kampus Merdeka. Selain itu untuk mengurangi hambatan dalam pembaruan kurikulum, maka didorong agar perguruan tinggi menyiapkan Dosen Fasilitator Kampus Merdeka sebagai konsultan perencanaan kurikulum Kampus Merdeka di tingkat program studi.

Sebagai apresiasi atas dukungan kepada program kampus merdeka, terbitlah kebijakan untuk memberikan Pengakuan kegiatan Tri Dharma bagi dosen pembimbing lapangan kegiatan Kampus Merdeka dan tim implementasi revisi kurikulum. Hal ini diharapkan memberikan semangat kepada para dosen untuk ikut terlibat secara aktif dalam menyukseskan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Di tahun 2021, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mendukung kebijakan kampus merdeka melalui empat program kampus merdeka. Semua program unggulan Kampus Merdeka ini dijamin 20 sks untuk partisipasi 1 semester dan 40 sks untuk partisipasi 2 semester sesuai dengan Kepmendikbud No. 74/P/2021.

Program unggulan yang pertama adalah Kampus Mengajar. Kemendikbud mengajak mahasiswa untuk menjadi agen perubahan pendidikan dengan mengajar di sekolah-sekolah terpilih. Di program ini mahasiswa membantu pembelajaran literasi dan numerasi untuk pelajar sekolah (selama 1 semester) dengan tujuan peningkatan skor PISA (*Programme for International Student Assessment*). Penerima manfaat adalah Mahasiswa yang memiliki kriteria berasal dari universitas dan prodi dengan akreditasi minimal B, IPK mahasiswa minimal 3.0 dan mahasiswa memiliki pengalaman mengajar atau berorganisasi. Bantuan pendanaan yang diberikan berupa Bantuan potongan UKT, Bantuan biaya hidup dan akomodasi serta Biaya transportasi ke sekolah tujuan. Program ini mendorong mahasiswa memiliki profil pelajar pancasila yang bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif.

Program unggulan selanjutnya yang didukung adalah program (Microcredentials): Magang Bersertifikat - LPDP memberikan dukungan berupa biaya hidup dan jaminan sks untuk mahasiswa yang berhasil diterima magang di program dan organisasi kelas dunia yang diakui Kemendikbud. Uang saku dan biaya hidup selama magang disubsidi oleh Kemendikbud. Mahasiswa menerima sertifikat kompetensi dari perusahaan setelah selesai magang.



Gambar 6 Tiga Contoh Program Microcredentials - Magang Bersertifikat

**Memecahkan permasalahan/ isu yang nyata**

- Mahasiswa diberikan **masalah nyata** yang berdampak kepada kinerja perusahaan
- Bekerja dalam **kelompok**



**Pembimbing atau mentor full-time**

- Dibimbing oleh **mentor staf profesional full-time**
- Program **magang** yang terstruktur



**Imersif dan disertai sertifikasi industri**

- Disertai **sertifikat industri** di akhir magang
- Durasi program 1 semester



Program Microcredentials Magang bersertifikat ini mendorong mahasiswa memiliki profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, bekebhinekaan global dan bergotong royong. Program keunggulan Microcredentials lainnya adalah Studi Independen Bersertifikat. Mahasiswa yang melakukan studi/sertifikasi dari organisasi atau perguruan tinggi terpilih akan diberikan dukungan biaya. Adapun yang dimaksud dengan program studi independen adalah mahasiswa mengikuti program sertifikasi atau *short course* yang diakui Kemendikbud selama 1 sampai 2 semester penuh. Mahasiswa menerima sertifikat jika lulus. Profil pelajar pancasila yang didorong dari program unggulan ketiga LPDP ini adalah pelajar yang bernalar kritis, mandiri dan kreatif.

Gambar 7 Tiga Contoh Program Studi Independen yang menjadi Unggulan LPDP Tahun 2021



Program unggulan ketiga LPDP adalah *Indonesian International Student Mobility Awards*. Beasiswa untuk mahasiswa S1 belajar 1-2 semester di perguruan tinggi luar negeri. Jenis Mobilitas Mahasiswa adalah *Student exchange programs* (1-2 semester), *Visiting student programs* (1-2 semester), *Short courses and summer courses* (<1 semester). Di antara manfaat program ini adalah pengalaman belajar dan berkolaborasi dengan mahasiswa dari seluruh dunia, kesempatan belajar sesuai minat akademik dan pemahaman lintas budaya, berkompetensi digital dan siap untuk dunia kerja. Dukungan dari Kemendikbud dan LPDP berupa konversi/penyetaraan SKS dari universitas luar negeri. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bernalar kritis, bergotong royong dan berkebhinekaan global.

Dalam pelaksanaan program pertukaran pelajar ini, masih ditemukan permasalahan yang menghambat kelancaran program, yang pertama permasalahan konversi, Banyak perguruan tinggi yang masih kesulitan dan belum memenuhi konversi nilai mahasiswa sehingga nilai hasil program MBKM ini belum dapat diolah dan belum bisa dijadikan hasil nilai yang digunakan di akhir semester.

Permasalahan lain yang cukup menggajal adalah proses yang masih manual. Dari diskusi yang mendalam didapatkan kenyataan bahwa beberapa perguruan tinggi belum memiliki sistem untuk proses pengelolaan data. Hal ini mengakibatkan pihak perguruan tinggi kesulitan melakukan pengelolaan nilai dan data mahasiswa peserta MBKM. Proses manual ini membuat data yang tidak dimasukkan secara otomatis tersebut bisa menimbulkan permasalahan lain, yang paling sering dijumpai adalah data yang terselip.

Program unggulan LPDP ke-empat adalah Pertukaran Mahasiswa Merdeka: Beasiswa untuk mahasiswa yang melakukan pertukaran ke perguruan tinggi lain di dalam negeri. Program Pertukaran Mahasiswa selama 1 semester yang bertujuan untuk saling mengenal antara satu daerah dengan daerah lainnya guna mempelajari keragaman kebudayaan Indonesia. Program ini mendapat dukungan dari LPD berupa Bantuan potongan UKT, Bantuan biaya hidup dan akomodasi, Biaya transportasi ke dan dari PT tujuan dan Bantuan asuransi kesehatan (BPJS). LPDP memberikan dukungan ini kepada Mahasiswa yang berasal dari PTN/ PTS dan prodi yang terakreditasi, Mahasiswa dari semester 3 sampai 8 dan Mahasiswa memiliki IPK minimal 2.75. Program unggulan ke-empat LPDP ini, diharapkan mampu mendorong mahasiswa memiliki profil pelajar Pancasila dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, dan bernalar kritis.

Untuk mengatasi permasalahan-pemmasalahan seputar implementasi kebijakan program pertukaran mahasiswa merdeka tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur, kampanye dan sosialisasi yang lebih intensif tentang manfaat program pertukaran, penyederhanaan proses administrasi, peningkatan alokasi anggaran, dan dukungan yang komprehensif bagi mahasiswa selama masa pertukaran. Selain itu, kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga terkait juga sangat penting untuk memfasilitasi implementasi yang sukses dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

## 5. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan publik program pertukaran mahasiswa dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka diyakini sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa melalui peningkatan *soft skills* mahasiswa untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 dan bonus demografi di Indonesia.

Sebagaimana termaktub dalam regulasinya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melakukan penyiapan kurikulum sebagai wadah rekognisi pembelajaran/kegiatan/aktivitas mahasiswa yang merdeka. Kebebasan pembelajaran/kegiatan/aktivitas diatur sesuai dengan target capaian pembelajaran (*learning objective*) yang telah ditetapkan. Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak), yaitu berupa penyediaan kesempatan mengikuti kegiatan di luar perguruan tinggi, ditambah lagi aktifitas perkuliahan satu semester di luar program studi di kampus yang sama.

Sebagai dukungan atas kepastian terlaksananya program MBKM tersebut pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membuka Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, di antara tujuannya memfasilitasi PT untuk mencapai penetapan IKU dan terimplementasinya kurikulum MBKM di semua PT secara maksimal.

Beberapa kampus di bawah naungan Kemendikbud dapat mengikuti program tersebut sembari berlatih mematangkan program ini secara lebih sempurna. Secara kebijakan, adanya program MBKM tersebut seyoginya muncul dari para pengelola program studi. Sayangnya, belum semua PT mampu menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan MBKM tersebut secara baik, terlebih karena adanya perlambatan aktivitas social selama masa lock down pandemi covid 19 yang lalu.

Kedelapan program MBKM yang ditawarkan sejatinya dapat membawa perubahan bagi para mahasiswa dan dosen dalam sebuah pola kegiatan yang lebih merdeka, tetap dalam kerangka penguatan kompetensi para mahasiswa. Bagi mahasiswa khususnya adanya program MKBM tentu sangat menguntungkan, antara lain peningkatan kompetensi, dan pengalaman baru (*new experiences*) sesuai kebutuhan mereka. Dari sisi jumlah distribusi mata kuliah yang dipilih jauh lebih simpel, karena boleh jadi mata kuliah tertentu tidak lagi dikuliahkan karena sudah berganti, terekognisi dengan kegiatan MBKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. A., & Asiah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ( Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar ) Implementation of the Independent Campus - Freedom to Learn Policy ( Study at the Faculty of Social Sciences and Law , Makass. Jurnal Kreatif Online (JKO), 9(4), 32-43. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/21817>
- AIPTKMI. 2022. Panduan Kurikulum Nasional Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Tahun 2021. UI Publishing
- Arifin, S., & Muslim, M. (2020). Tantangan Implemenasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam, 3(1), 1-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v3i1.589>
- Asiah, N. (2020). Implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka (studi pada fakultas ilmu sosial dan hukum universitas negeri makassar). Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951-952., 5-24. <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>
- Aswita, D. (2022). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm): Inventarisasi Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. In D. Aswita (Ed.), Prosiding Seminar Nasional Biotik (Vol. 9, Issue 2, p. 56). Universitas Serambi Mekah. <https://doi.org/10.22373/pbio.v9i2.11747>
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran, 4(1), 195-205. <https://www.e-journal.my.id/jsgp/article/view/591>
- Dewi Hapsari, S., Lestari, H. P., Nurjannah, & Suranto. (2022). The role of MBKM in education post-COVID-19 pandemic. In S. Dewi Hapsari, H. P. Lestari, Nurjannah, & Suranto (Eds.), Proceeding International Seminar on Islamic Studies (Vol. 3, pp. 613-618). Universitas Muhammadiyah surakarta. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/9606>

- Ecca, S., Mustanir, A., Ahmad, J., Ramlan, P., Adri, K., Mardhatillah, M., & Sulaiman, Z. (2022). Peran Program Pertukaran Pelajar MBKM dalam Pengembangan Kompetensi Lulusan. SAP (Susunan Artikel Pendidikan), 6(3), 323-330. <https://doi.org/10.30998/sap.v6i3.11713>
- Fuadi, T. M. (2021). Hubungan perguruan tinggi swasta dengan pemerintah dalam implementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). SEMDI UNAYA, 4(1), 267-286. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/semdiunaya/article/view/2660>  
%0Ahttp://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/semdiunaya/article/download/2660/1061
- Hendar, Heryono, H., Kuraesin, U., Nurohmah, H., & Novitasari, R. (2022). Towards the Curriculum of Independent Learning-Independent. English Journal Literacy Utama, 6(2), 560-566. <https://doi.org/https://doi.org/10.33197/ej lutka.vol6.iss2.2022.181>
- Junaidi, Aris. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Sidiq Umar dan Miftachul Choiri. 2019. Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi di Bidang Pendidikan. CV. Nata Karya.
- Sopiansyah dkk. 2022. Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Reslaj Vol 4 Nomor 1
- Sulistiyan dkk. 2022. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Fakultas Kesehatan dan Non Kesehatan. Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 4 Nomor 1

# **BAB IV**

## **EVALUASI KEBIJAKAN MBKM ASISTENSI MENGAJAR YANG INKLUSIF DAN RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MAHASISWA SEBAGAI PROSES PENINGKATAN SOFT SKILL DI LINGKUNGAN AKADEMIK**

Adi Sopian  
Universitas Islam Nusantara, Bandung  
adisopian@gmail.com

### **1. PENDAHULUAN**

Dalam lingkungan akademik, kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa memainkan peran penting dalam meningkatkan *soft skill* mereka. Asistensi mengajar adalah suatu bentuk dukungan yang diberikan kepada mahasiswa oleh dosen atau asisten dosen dalam rangka membantu mereka mengatasi tantangan akademik yang dihadapi. Dengan pendekatan inklusif dan responsif, kebijakan ini berusaha untuk memastikan bahwa semua mahasiswa, terlepas dari latar belakang mereka, menerima dukungan yang memadai untuk mengembangkan keterampilan lunak yang dibutuhkan untuk sukses di dunia profesional.

Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidik adalah suatu kegiatan di mana mahasiswa melakukan pengajaran di tingkat pendidikan dasar/madrasah atau pendidikan menengah dalam periode waktu tertentu. Sekolah yang terlibat dalam program ini bisa berlokasi di kota maupun daerah terpencil. Pembelajaran dalam Asistensi Mengajar di Satuan Pendidik (AMSP) dilakukan oleh mahasiswa melalui praktik mengajar. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan mengajar mahasiswa serta membantu mengatasi masalah pendidikan di sekolah. Melalui AMSP, mahasiswa dapat mendapatkan pemahaman yang luas melalui interaksi langsung dengan staf sekolah dan



menghadapi situasi nyata di lapangan. Asistensi mengajar di satuan pendidikan memberi kesempatan pada mahasiswa untuk melihat, merasakan, dan menyelesaikan masalah pendidikan dengan menggunakan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Proses belajar di luar kelas selama AMSP akan berkontribusi pada pengembangan pemahaman dan keterampilan mahasiswa yang nantinya akan bermanfaat saat mereka memasuki dunia kerja sebenarnya.

Kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa dalam meningkatkan *soft skill* mereka. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan oleh Smith et al. (2018) mengungkapkan bahwa kebijakan asistensi mengajar yang memperhatikan kebutuhan individu dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mahasiswa. Dalam penelitian ini, mereka menemukan bahwa mahasiswa yang mendapatkan dukungan yang responsif dari asisten dosen cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan *soft skill* seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim.

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Johnson (2020) menyoroti pentingnya kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dalam meningkatkan keberagaman dan inklusivitas di lingkungan akademik. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika asistensi mengajar disesuaikan dengan kebutuhan individu dan memberikan perhatian khusus terhadap mahasiswa yang berasal dari latar belakang yang beragam, mahasiswa tersebut merasa lebih diterima dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini berkontribusi pada pengembangan *soft skill* interpersonal seperti empati, toleransi, dan kemampuan bekerja dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda.

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa memiliki dampak positif dalam meningkatkan *soft skill* mereka di lingkungan akademik. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut sangat

penting untuk memastikan bahwa dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Melalui penelitian ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang efektivitas kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif dalam meningkatkan *soft skill* mahasiswa, serta mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2019) juga mengeksplorasi hubungan antara kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif dengan peningkatan *soft skill* mahasiswa. Dalam penelitian ini, mereka melibatkan kelompok mahasiswa dengan berbagai tingkat kemampuan akademik dan kebutuhan belajar yang beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika asistensi mengajar disesuaikan dengan kebutuhan individu dan memberikan perhatian yang tepat, terjadi peningkatan signifikan dalam keterampilan komunikasi interpersonal, kemampuan pemecahan masalah, serta kemampuan beradaptasi dalam situasi yang berbeda-beda.

Penelitian-penelitian ini menyiratkan bahwa kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa tidak hanya berdampak positif terhadap peningkatan *soft skill*, tetapi juga mendorong pengembangan kesetaraan, keberagaman, dan inklusivitas di lingkungan akademik. Dalam lingkungan pendidikan yang inklusif, semua mahasiswa diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan keterampilan lunak yang diperlukan dalam karier mereka. Evaluasi kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif menjadi krusial dalam memastikan bahwa pendekatan ini efektif dan berdampak nyata terhadap perkembangan *soft skill* mahasiswa.

Dalam penelitian ini, kami bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif dalam konteks peningkatan *soft skill* di lingkungan akademik. Kami akan mengumpulkan data melalui survei kepada mahasiswa yang telah

mengalami asistensi mengajar dan menganalisis dampaknya terhadap perkembangan keterampilan lunak mereka. Selain itu, kami juga akan melibatkan dosen, asisten dosen, dan staf administrasi untuk mendapatkan wawasan mereka tentang implementasi kebijakan ini dan kendala yang mungkin dihadapi.

Dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan assistensi mengajar yang inklusif dan responsif, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari pendekatan ini, serta mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih lanjut. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan yang berharga bagi lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan kebijakan assistensi mengajar yang dapat memperkuat soft skill mahasiswa, menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan responsif, serta mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang relevan dan dibutuhkan di dunia kerja.

Dalam rangka mempersiapkan lulusan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITBS) agar dapat menghadapi perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, serta untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja di masa depan, penting untuk memperkuat kompetensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang ada. Hal ini penting karena adanya hubungan timbal balik antara pendidikan tinggi, dunia usaha, dunia industri, dan isu-isu yang terkait dengan perubahan cepat di masa depan.

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma telah melaksanakan program MBKM sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Pada semester genap tahun 2021, program MBKM melibatkan 40 mahasiswa dengan skema MBKM institusional supporting system (ISS). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kholik et al. (2022), program MBKM ini telah terbukti berdampak pada proses pembelajaran mahasiswa. Melalui kebijakan program MBKM, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjalani proses pembelajaran selama tiga

semester di luar program studi mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan minat dan minat mereka. Kegiatan MBKM ini juga memberikan peningkatan dalam pengembangan *hard-skill* dan *soft-skill* bagi mahasiswa.

## 2. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dapat diangkat dalam Evaluasi Kebijakan Asistensi Mengajar yang Inklusif dan Responsif terhadap Kebutuhan Mahasiswa sebagai Proses Peningkatan Soft Skill di Lingkungan Akademik adalah: (1) Sejauh mana kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif telah diimplementasikan secara efektif di lingkungan akademik? (2) Bagaimana respons mahasiswa terhadap kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif dalam mendukung pengembangan *soft skill* mereka? (3) Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam peningkatan *soft skill* mahasiswa sebelum dan setelah implementasi kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif? (4) Apakah kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif telah berhasil meningkatkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim mahasiswa? (5) Bagaimana peran dosen, asisten dosen, dan staf administrasi dalam implementasi kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif? (6) Apakah kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif, dan bagaimana cara mengatasinya? dan (7) Bagaimana dampak kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif terhadap keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan partisipasi aktif dalam lingkungan akademik?

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti memilih ITB Swadharma sebagai lokasi penelitian karena ITB Swadharma ini merupakan salah satu institut yang menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan telah memiliki pengalaman dalam implementasi kebijakan kampus mengajar.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui: (a) Survei kepada mahasiswa dengan memberikan pertanyaan terkait persepsi dan pengalaman mahasiswa terhadap kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif, serta dampaknya terhadap peningkatan *soft skill* mereka; (b) Wawancara dengan dosen, asisten dosen, dan staf administrasi melalui wawancara terstruktur atau semi-terstruktur dengan pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman mereka tentang implementasi kebijakan assistensi mengajar yang inklusif dan responsif, serta tantangan yang dihadapi.

Pengolahan dan Analisis Data menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis data survei mahasiswa, seperti menghitung *mean*, *median*, dan persentase respons. Serta menganalisis wawancara dengan dosen, asisten dosen, dan staf administrasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait implementasi kebijakan assistensi mengajar yang inklusif dan responsif. Melakukan analisis perbandingan sebelum dan setelah dengan cara membandingkan data *soft skill* mahasiswa sebelum dan setelah implementasi kebijakan assistensi mengajar yang inklusif dan responsif menggunakan metode yang relevan, seperti uji t-paired atau analisis perbedaan.

Analisis perbedaan antar kelompok bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan *soft skill* antara mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda menggunakan uji statistik yang sesuai, seperti uji t-independent atau analisis varian. Serta

untuk menguji validasi data dilakukan triangulasi data untuk menggunakan multiple data sources seperti survei, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan valid.

#### 4. PEMBAHASAN

Kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan *soft skill* mahasiswa di lingkungan akademik. Dengan memperhatikan kebutuhan individu dan keberagaman mahasiswa, kebijakan ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memfasilitasi partisipasi aktif, dan memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim. Asistensi mengajar yang inklusif dan responsif memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Melalui interaksi dengan asisten dosen, mahasiswa dapat mengasah keterampilan komunikasi mereka, memperluas pemahaman konsep, dan belajar bekerja sama dalam tim. Dalam proses ini, mahasiswa juga dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, kritis berpikir, dan adaptabilitas yang penting dalam dunia kerja.

Sebelum mengikuti kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan mahasiswa harus melakukan persiapan dan pendaftaran yaitu sebagai berikut:

- a) Mahasiswa yang ingin melakukan asistensi mengajar harus mengisi formulir permohonan dan menyerahkannya ke Bagian Administrasi Asistensi Mengajar di BAAK. Formulir tersebut akan diproses dan dibuatkan surat permohonan ke sekolah.
- b) Bagian Administrasi Asistensi Mengajar di BAAK akan membuat Surat Permohonan Asistensi Mengajar yang akan dikirim oleh mahasiswa ke sekolah tempat mereka akan mengajar.

- c) Jika sekolah telah menerima rencana Asistensi Mengajar mahasiswa, mahasiswa tersebut harus melapor ke Bagian Administrasi Asistensi Mengajar di BAAK untuk meminta surat pengantar dari jurusan kepada sekolah.
- d) BAAK akan membuat Surat Pengantar yang akan dibawa oleh mahasiswa ke sekolah tempat Asistensi Mengajar akan dilakukan.
- e) Jika mahasiswa yang diterima oleh sekolah tidak dapat mengikuti Asistensi Mengajar pada waktu yang telah ditentukan oleh sekolah, maka mahasiswa tersebut harus melaporkan kepada jurusan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lain yang telah mendaftar Asistensi Mengajar sebelumnya.
- f) Jika ada mahasiswa yang bersedia untuk menggantikan, BAAK akan membuat surat pengantar untuk mahasiswa pengganti. Jika tidak ada pengganti, jurusan akan membuat surat pemberitahuan ke sekolah.
- g) Mahasiswa yang ingin mengikuti Asistensi Mengajar harus memenuhi persyaratan berikut: aktif sebagai mahasiswa, tidak sedang mengambil cuti kuliah, telah menempuh minimal lima semester, memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00, mendapatkan rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi, minimal berada pada semester 6 dan telah mengikuti kuliah pembekalan asistensi Mengajar. Mahasiswa yang melaksanakan Asistensi Mengajar diberikan jangka waktu efektif selama 16 minggu atau sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh sekolah dengan batas waktu maksimum 6 bulan. Pelaksanaan Asistensi Mengajar tidak boleh mengganggu proses perkuliahan yang sedang berlangsung. Kehadiran dan kedisiplinan mahasiswa sangat penting seperti karyawan/staf di

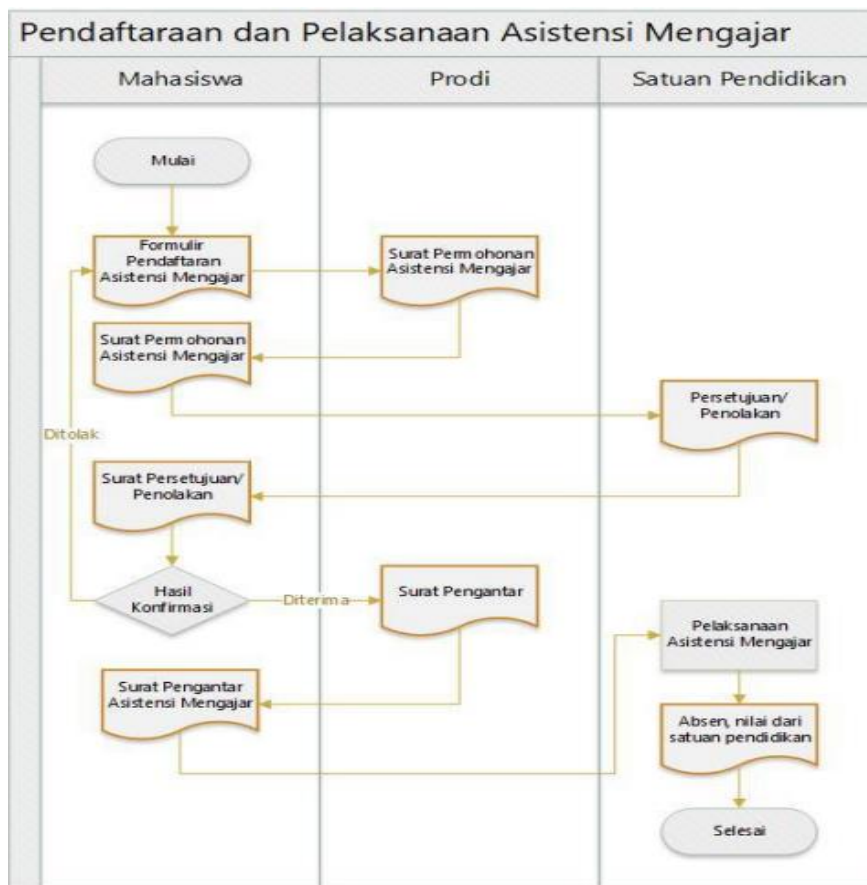
tempat pelaksanaan Asistensi Mengajar.

- h) Kegiatan yang dilakukan mahasiswa adalah membantu pelaksanaan tugas-tugas pada bagian/divisi tertentu di satuan pendidikan.
- i) Dalam waktu satu minggu setelah selesai Asistensi Mengajar, mahasiswa harus melaporkan ke jurusan. Jika pendaftaran melewati batas waktu satu minggu, maka Asistensi Mengajar mahasiswa tersebut diulang.
- j) Ketua Program Studi akan menugaskan mahasiswa tersebut kepada dosen penanggung jawab mata kuliah Asistensi Mengajar yang akan membimbingnya dalam penyusunan laporan, presentasi, dan memberikan nilai akhir.
- k) Nilai akhir mata kuliah Asistensi Mengajar ditentukan berdasarkan nilai dari satuan pendidikan/instansi tempat Asistensi Mengajar (60%) dan nilai dari pembimbing yang mencakup nilai proses pembimbingan, nilai laporan, dan nilai seminar (40%).

Setelah melakukan serangkaian kegiatan persiapan dan pendaftaran mahasiswa harus melakukan observasi terhadap sekolah yang akan menjadi lokasi kegiatan. Observasi dilakukan setelah mahasiswa diberikan oleh dosen pembimbing kepada sekolah. Semua aspek yang ada dalam format observasi harus diamati dan dicatat dalam lembar observasi. Mahasiswa harus menyediakan dan mempelajari perangkat pembelajaran serta menyusun kelengkapan mengajar di bawah bimbingan pembimbing lapangan (Guru Pamong). Sebelum memulai kegiatan Asistensi Mengajar di sekolah, mahasiswa harus memberikan bimbingan kepada guru yang akan menjadi pembimbing di sekolah mengenai materi yang akan disampaikan serta RPP, modul, dan perangkat lain yang harus disiapkan.



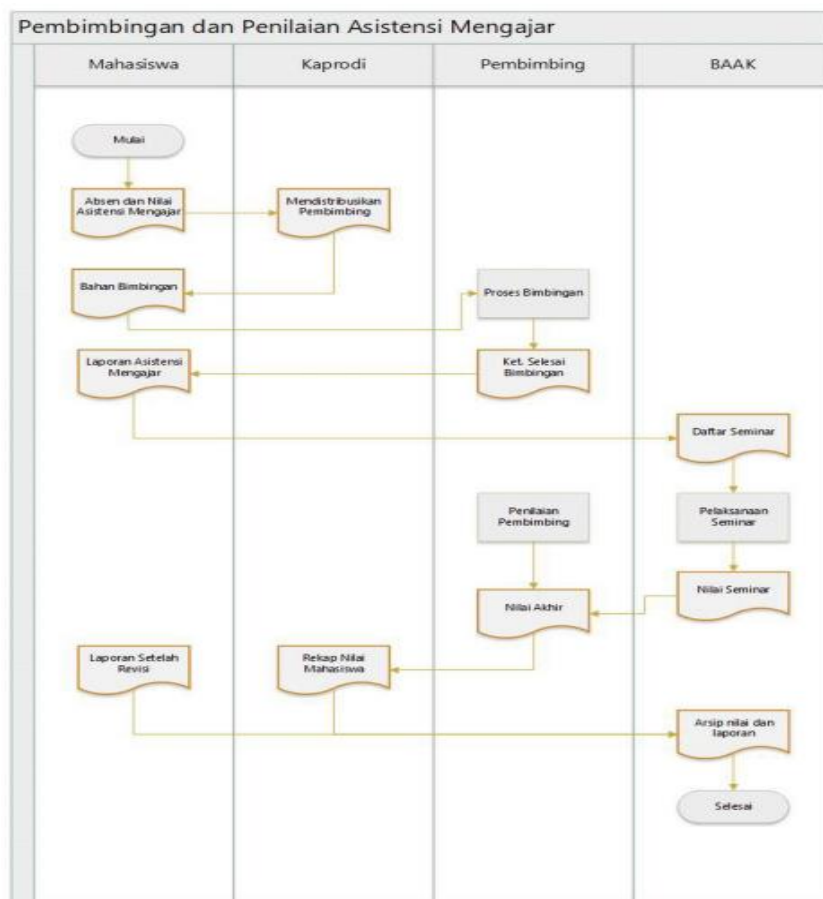
Gambar 8 Pendaftaran dan Pelaksanaan Asistensi Mengajar



Tahap selanjutnya yaitu Penilaian dan Evaluasi, pembimbing Asistensi Mengajar memberikan nilai setelah mahasiswa menyelesaikan laporan akhir. Mahasiswa harus menyelesaikan laporan akhir Asistensi Mengajar dalam waktu maksimal satu minggu setelah seminar Asistensi Mengajar dilaksanakan. Pembimbing memberikan penilaian berdasarkan: 60% dari nilai satuan pendidikan dan 40% dari pembimbing Asistensi Mengajar. Mahasiswa harus menyerahkan formulir penilaian Asistensi Mengajar kepada pembimbing setelah menyerahkan laporan akhir. Pembimbing memberikan nilai akhir terhadap hasil Asistensi Mengajar mahasiswa tersebut. Pembimbing memberikan form nilai yang telah diisi

kepada koordinator Asistensi Mengajar. Pembimbing merekap hasil nilai Asistensi Mengajar dan menyerahkan salinannya kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) ITP. Untuk dokumentasi, laporan evaluasi kegiatan dikirimkan ke satuan pendidikan/instansi tempat pelaksanaan asistensi mengajar.

Gambar 9 Pembimbingan dan Penilaian Asistensi Mengajar



Implementasi evaluasi kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa sebagai proses peningkatan *soft skill* di lingkungan akademik menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa hambatan umum yaitu keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana, personel, maupun infrastruktur. Implementasi kebijakan yang inklusif dan responsif membutuhkan pengalokasian sumber daya yang memadai untuk melibatkan asisten dosen yang cukup, menyediakan pelatihan, dan mendukung kegiatan peningkatan *soft skill* mahasiswa. Kurangnya sumber daya ini dapat menghambat implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif juga dapat menjadi hambatan. Dosen, asisten dosen, dan mahasiswa mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat dan tujuan dari kebijakan ini. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih aktif dalam mensosialisasikan kebijakan, memberikan informasi yang jelas, dan mengedukasi semua pemangku kepentingan terkait manfaatnya bagi pengembangan *soft skill* mahasiswa.

Lingkungan akademik sering kali memiliki struktur dan budaya yang kaku, yang dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan yang inklusif dan responsif. Budaya kompetitif, hierarkis, atau kurangnya dukungan untuk kerjasama tim dapat menghambat partisipasi aktif dan kolaborasi antara dosen, asisten dosen, dan mahasiswa.

Selain itu, struktur organisasi yang kaku dan prosedur administratif yang kompleks juga dapat menghambat kelancaran implementasi kebijakan. Perubahan kebijakan sering kali dihadapi dengan resistensi dari beberapa pihak. Beberapa dosen atau staf akademik mungkin enggan mengubah cara mereka mengajar atau bekerja karena alasan kenyamanan atau ketidakpastian terkait perubahan tersebut. Resistensi terhadap perubahan ini dapat memperlambat atau bahkan menghambat implementasi kebijakan yang inklusif dan responsif.

Kurangnya pengukuran dan evaluasi yang memadai dapat menjadi hambatan dalam menilai keberhasilan kebijakan. Evaluasi yang tidak akurat atau tidak komprehensif dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi kekurangan dan memperbaikinya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan indikator yang tepat, metode evaluasi yang valid, dan mekanisme umpan balik yang efektif untuk memastikan keberhasilan kebijakan.

Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan komitmen, kolaborasi, dan upaya yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan terkait. Penting untuk melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dan memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif.

Namun, kebijakan ini juga membawa peluang untuk mendorong perubahan positif dalam budaya akademik, meningkatkan inklusivitas, dan memperkuat kualitas pendidikan di lingkungan akademik. Dengan menerapkan kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif, peluang terbuka bagi semua mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di mana mahasiswa dari latar belakang yang beragam merasa didukung dan dihargai. Dalam lingkungan ini, mahasiswa merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik, berkontribusi dalam diskusi kelas, dan bekerja sama dalam proyek tim, yang secara langsung meningkatkan pengembangan *soft skill* mereka.

Kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif memungkinkan adanya interaksi yang lebih personal antara mahasiswa dan asisten dosen. Hal ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan bimbingan individual, umpan balik yang konstruktif, dan dukungan tambahan dalam memahami materi pelajaran. Dengan adanya bantuan yang lebih terfokus dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa,

kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga membantu dalam pengembangan *soft skill* mahasiswa.

Implementasi kebijakan assistensi mengajar yang inklusif dan responsif dapat membantu mahasiswa mengembangkan *soft skill* yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Melalui interaksi dengan asisten dosen yang terlatih dan berpengalaman, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan kepemimpinan. Ini membantu mereka memperoleh keterampilan yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi, baik dalam konteks akademik maupun profesional.

Berikutnya, implementasi kebijakan yang inklusif dan responsif dalam assistensi mengajar mendorong inovasi pendidikan di lingkungan akademik. Dosen dan asisten dosen dapat menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang kreatif dan berpusat pada mahasiswa untuk mengoptimalkan proses pengajaran. Ini menciptakan ruang bagi eksperimen, kolaborasi, dan pengembangan metode pembelajaran yang inovatif. Selain itu, dengan mengamati dan mengukur efektivitas kebijakan, pengembangan pendekatan dan strategi baru dalam meningkatkan *soft skill* mahasiswa dapat dilakukan.

Dengan adanya kebijakan assistensi mengajar yang inklusif dan responsif, mahasiswa dapat mengembangkan *soft skill* yang diakui dan dicari oleh dunia kerja. Kemampuan komunikasi yang baik, keterampilan kolaborasi, kepemimpinan yang efektif, dan kemampuan pemecahan masalah dapat meningkatkan prospek karier mahasiswa. Hal ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sukses dalam karier mereka, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Implementasi kebijakan assistensi mengajar yang inklusif dan responsif memberikan peluang nyata untuk mengubah evaluasi kebijakan tersebut terhadap kebutuhan mahasiswa sebagai proses peningkatan *soft*

*skill* di lingkungan akademik. Dengan fokus pada inklusivitas, partisipasi, pengembangan kualitas pembelajaran, dan relevansi *soft skill*, kebijakan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendukung pengembangan penuh potensi mahasiswa.

Persepsi terhadap kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa sebagai proses peningkatan *soft skill* di lingkungan akademik dapat bervariasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, asisten dosen, dan mahasiswa itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa kemungkinan persepsi yang mungkin muncul:

a) Mahasiswa yang Mendapatkan Manfaat:

Mahasiswa yang merasakan manfaat dari kebijakan ini cenderung memiliki persepsi positif terhadapnya. Mereka mungkin merasa didukung dan dihargai oleh asisten dosen yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Persepsi positif ini dapat muncul karena mahasiswa merasa lebih terlibat dalam pembelajaran, mendapatkan bantuan yang lebih personal, dan mengembangkan *soft skill* yang relevan. Mahasiswa ini mungkin melihat kebijakan asistensi mengajar sebagai upaya yang berharga dalam meningkatkan pengalaman belajar mereka di lingkungan akademik.

b) Dosen dan Asisten Dosen yang Terlibat:

Dosen dan asisten dosen yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini mungkin memiliki persepsi yang beragam. Beberapa dari mereka mungkin melihat kebijakan ini sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam perkembangan mahasiswa dan kualitas pendidikan. Mereka mungkin merasakan kepuasan dalam memberikan bantuan yang efektif kepada mahasiswa dan melihat perkembangan *soft skill* mereka. Namun, ada juga kemungkinan bahwa beberapa dosen atau asisten dosen mungkin

menghadapi tantangan dalam mengadaptasi metode pengajaran mereka atau membagi waktu mereka secara efektif antara tugas pengajaran dan tugas akademik lainnya. Persepsi mereka terhadap kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan perspektif pribadi mereka.

c) Pihak Administrasi Perguruan Tinggi:

Persepsi pihak administrasi perguruan tinggi terhadap kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif dapat bervariasi. Mereka mungkin melihat kebijakan ini sebagai langkah yang positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat reputasi institusi. Namun, mereka juga harus mempertimbangkan aspek anggaran dan pengalokasian sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Persepsi mereka akan dipengaruhi oleh pertimbangan administratif, keberlanjutan kebijakan, dan dampaknya terhadap tujuan institusi.

d) Masyarakat Luas:

Persepsi masyarakat luas terhadap kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan tinggi dan perkembangan soft skill. Beberapa masyarakat mungkin melihat kebijakan ini sebagai langkah yang progresif dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks. Namun, ada juga kemungkinan persepsi skeptis atau kurangnya pemahaman tentang manfaat konkrit dari kebijakan ini.

e) Mitra:

- 1) Memperoleh pengetahuan, informasi, dan keterampilan terkini dari mahasiswa dan dosen pembimbing.
- 2) Membantu kemajuan pendidikan di setiap wilayah dengan melibatkan mahasiswa yang memiliki semangat dan minat

dalam mengajar/mendidik.

- 3) Mendapatkan kontribusi, ide, dan masukan dari mahasiswa yang dapat berperan dalam pengembangan pendidikan.
- 4) Memberikan kesempatan untuk mendapatkan sumber daya manusia dari lulusan perguruan tinggi yang memiliki kualifikasi dalam mengajar di lembaga pendidikan.
- 5) Menciptakan mitra kolaboratif untuk menangani masalah pendidikan di lembaga pendidikan.
- 6) Membuka peluang akses dan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah mitra.

Persepsi terhadap kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif akan beragam dan bergantung pada perspektif masing-masing pemangku kepentingan. Evaluasi dan umpan balik terus-menerus dari semua pihak terlibat dapat membantu memperbaiki implementasi kebijakan ini dan memastikan persepsi yang semakin positif seiring waktu.

## **5. KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan asistensi mengajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa sebagai proses peningkatan soft skill di lingkungan akademik merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Implementasi kebijakan ini membutuhkan perhatian yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta upaya kolaboratif dari berbagai pihak terkait. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan mengadopsi pendekatan yang inklusif, kebijakan asistensi mengajar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membantu mahasiswa mengembangkan soft skill yang relevan dan mempersiapkan mereka untuk sukses dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Brown, J. D., & Atkins, R. (2019). Assessing the Impact of Teaching Assistant Training Programs on Graduate Teaching Assistant Instructional Skills and Confidence. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 31(1), 170-181.
- Chen, L., Chen, C., & Wang, H. (2019). Inclusive Teaching Assistantship and Its Effects on College Students' Interpersonal Skills and Problem-Solving Skills. *Journal of College Student Development*, 60(6), 672-688.
- Gopalan, A., & Jolly, P. (2021). Teaching Assistants as Co-educators: Examining the Impact on Students' Soft Skill Development. *Journal of Education and Work*, 34(2), 195-212.
- Johnson, E. N., & Thomas, R. (2021). The Role of Teaching Assistants in Enhancing Soft Skills Development: A Systematic Review. *Journal of University Teaching & Learning Practice*, 18(2), 1-23.
- Johnson, M. K. (2020). Creating Inclusive Environments: The Role of Teaching Assistants in Promoting Diversity and Inclusion. *College Teaching*, 68(1), 25-35.
- Pastikan untuk menggunakan metode pengutipan yang sesuai dengan gaya penulisan referensi yang digunakan di institusi atau jurnal yang Anda tuju.
- Smith, A., Johnson, B., & Lee, C. (2018). The Impact of Inclusive Teaching Assistantship Policies on Student Confidence and Motivation. *Journal of Higher Education*, 89(3), 347-372.
- Yang, X., Wang, X., & Chen, L. (2020). The Influence of Inclusive Teaching Assistantship on College Students' Adaptability to Different Situations. *Journal of Curriculum and Teaching*, 9(1), 51-61.

# **BAB V**

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA RELEVANSINYA TERHADAP KEGIATAN PROYEK KEMANUSIAAN DI ERA 5.0 DALAM MEMBENTUK MAHASISWA ITB SWADHARMA YANG BERKARAKTER SERTA PROFESIONAL**

Ida Farida Fitriyani  
Universitas Islam Nusantara, Bandung  
idaf13632@gmail.com

### **1. PENDAHULUAN**

Di era digital yang terus berkembang dengan pesat, pendidikan tinggi menghadapi berbagai tantangan baru. Dalam upaya menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang inovatif melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah, mengakses sumber belajar, dan mengembangkan keahlian di luar kurikulum formal. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. MBKM memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan, terutama mahasiswa, dalam memilih bidang yang diminati (Rodiyah, 2021; Yuherman, Nugroho & Sunarsi, 2021). Kampus Merdeka adalah salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, yang memberikan Perguruan Tinggi wewenang untuk memberikan hak belajar selama tiga semester di luar program studi. Kampus Merdeka pada intinya adalah sebuah konsep inovatif yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi (Leuwol et al., 2020; Muhsin, 2021; Wijayanto, 2021).

Selain itu, MBKM mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang dapat berguna dalam dunia kerja. Program MBKM di perguruan tinggi mengedepankan pembelajaran yang fleksibel dan mandiri, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan inovatif, serta disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan utama program MBKM adalah untuk menyesuaikan lulusan dengan kebutuhan industri dan usaha, serta mengembangkan keilmuan lintas dan transdisiplin. Melalui program ini, mahasiswa dapat memperoleh kompensasi dalam bentuk satuan kredit semester (SKS) sebanyak 20 hingga 40 SKS melalui pembelajaran di luar program studi.

Program MBKM telah diterapkan di Perguruan Tinggi di Indonesia dengan langkah awal yaitu menyusun kurikulum yang sesuai dengan pedoman MBKM yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Delapan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM telah dilaksanakan secara menyeluruh, dan mahasiswa di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia meresponsnya dengan sangat positif (Suryani, Mbagho & Mei, 2022; Aisyianita et al., 2022; Nita et al., 2022). Hal ini terlihat dari antusiasme mahasiswa dalam mengikuti setiap program MBKM yang ditawarkan, seperti Program Kampus Mengajar, Studi Independen/Magang Bersertifikat, Proyek Kemanusiaan, Pertukaran Pelajar, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI), dan lain-lain.

Untuk mengevaluasi pencapaian implementasi program MBKM di sebuah Perguruan Tinggi atau pada tingkat program studi, terdapat tiga aspek yang diperhatikan. Pertama, aspek pelaksanaan yang melibatkan peran Perguruan Tinggi dalam memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti program MBKM. Kedua, aspek keterlibatan mahasiswa yang mencakup jumlah mahasiswa yang mengikuti program MBKM, dihitung sebagai rasio terhadap jumlah total mahasiswa. Ketiga, aspek keterlibatan dosen yang meliputi jumlah dosen yang terlibat sebagai pembimbing atau pengarah

dalam program MBKM (Cakrawala & Hakim, 2021). Tingkat pencapaian program studi atau Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan program MBKM diukur berdasarkan tiga aspek tersebut.

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan karakter, kemandirian, dan profesionalisme mahasiswa. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Smith dkk. (2019) menemukan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam program MBKM memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mereka sendiri. Mereka juga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengintegrasikan pengalaman belajar di dalam dan di luar kampus, yang merupakan aspek penting dalam menghadapi proyek-proyek kemanusiaan di era 5.0.

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma merupakan salah satu perguruan tinggi telah berperan aktif dalam menerapkan kebijakan MBKM ini. Sebagai lembaga pendidikan tinggi ITB Swadharma memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya berkualitas dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan profesionalisme yang tinggi.

Johnson dkk. (2020) mengungkapkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam program MBKM cenderung mengembangkan karakter yang kuat, termasuk kepemimpinan, kerjasama tim, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Ini berarti bahwa mahasiswa ITB Swadharma yang terlibat dalam kebijakan MBKM memiliki kualitas yang diharapkan untuk menjadi bagian dari proyek-proyek kemanusiaan di era 5.0, di mana kerjasama tim yang kuat dan pemecahan masalah inovatif menjadi kunci sukses.

Pada saat yang sama, di era 5.0 yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang cepat dan perubahan sosial yang mendalam, kegiatan proyek kemanusiaan semakin penting. Proyek-proyek ini melibatkan penyelesaian masalah yang kompleks dan membutuhkan kerjasama tim yang kuat serta pemecahan masalah yang inovatif. Mahasiswa ITB Swadharma, sebagai calon pemimpin masa depan, perlu mempersiapkan diri mereka dengan baik untuk menghadapi tantangan kemanusiaan yang muncul di era ini.

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki relevansi yang besar terhadap kegiatan proyek kemanusiaan di era 5.0. Fleksibilitas yang diberikan oleh kebijakan MBKM memungkinkan mahasiswa ITB Swadharma untuk mengakses berbagai macam mata kuliah lintas disiplin dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang masalah kemanusiaan dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam proyek-proyek kemanusiaan.

Kebijakan MBKM juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian. Mahasiswa ITB Swadharma didorong untuk mengambil inisiatif dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mereka sendiri, serta mengintegrasikan pengalaman belajar di dalam dan di luar kampus. Dalam konteks kegiatan proyek kemanusiaan, hal ini menjadi kualitas yang sangat penting. Mahasiswa yang memiliki inisiatif, kemandirian, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial mereka akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan menghadapi tantangan kemanusiaan dengan lebih efektif.

Melalui kebijakan MBKM, mahasiswa ITB Swadharma juga diberi kesempatan untuk mengembangkan karakter yang kuat dan profesionalisme yang tinggi. Mereka didorong untuk menggali minat dan bakat mereka secara lebih mendalam, sehingga dapat mengembangkan keahlian yang unik.

Selain itu, Lee dkk. (2021) menunjukkan bahwa kebijakan MBKM dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan profesionalisme yang diperlukan untuk sukses di dunia kerja. Dengan mengakses berbagai macam mata kuliah lintas disiplin dan pengalaman belajar yang lebih luas, mahasiswa ITB Swadharma dapat mengembangkan pemahaman yang holistik tentang masalah kemanusiaan dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan proyek-proyek kemanusiaan, seperti manajemen proyek, analisis kebijakan, dan komunikasi efektif.

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki relevansi yang kuat terhadap kegiatan proyek kemanusiaan di era 5.0. Fleksibilitas yang diberikan oleh kebijakan MBKM memungkinkan mahasiswa ITB Swadharma untuk mengembangkan kemandirian, karakter yang kuat, dan profesionalisme yang tinggi, yang merupakan kualitas yang sangat penting dalam menghadapi tantangan kemanusiaan di era yang terus berkembang ini. Dengan demikian, melalui implementasi kebijakan MBKM, mahasiswa ITB Swadharma dapat membentuk diri mereka menjadi mahasiswa yang berkarakter dan mempunyai jiwa profesional.

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki dampak positif terhadap pengembangan keterampilan mahasiswa ITB Swadharma yang relevan dengan kegiatan proyek kemanusiaan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Chen dan koleganya (2022) menemukan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam program MBKM memiliki kemampuan yang lebih baik dalam berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi tim, yang merupakan keterampilan yang sangat diperlukan dalam proyek-proyek kemanusiaan di era 5.0.

Selain itu, penelitian oleh Li, dkk (2021) mengungkapkan bahwa kebijakan MBKM mendorong mahasiswa untuk mengembangkan sikap proaktif dan inovatif. Mahasiswa yang memiliki sikap proaktif cenderung lebih aktif dalam mencari peluang untuk terlibat dalam proyek kemanusiaan dan memberikan kontribusi yang berarti. Sementara itu, sikap inovatif memungkinkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan kemanusiaan dengan cara yang kreatif dan efektif.

Wang dkk (2023) menunjukkan bahwa kebijakan MBKM dapat memperluas wawasan mahasiswa ITB Swadharma tentang isu-isu kemanusiaan global. Melalui akses yang lebih luas terhadap sumber belajar dan kesempatan untuk belajar dari pengalaman di luar kampus, mahasiswa ITB Swadharma dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Hal ini akan membantu mereka dalam mengembangkan solusi yang relevan dan berkelanjutan dalam proyek kemanusiaan.

Dengan demikian, Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki relevansi yang signifikan terhadap kegiatan proyek kemanusiaan di era 5.0. Fleksibilitas yang diberikan oleh kebijakan MBKM memungkinkan mahasiswa ITB Swadharma untuk mengembangkan keterampilan kritis, pemecahan masalah, kolaborasi tim, sikap proaktif, inovatif, serta pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kemanusiaan global. Semua ini akan berkontribusi dalam membentuk mahasiswa ITB menjadi individu yang berkarakter, profesional, dan siap menghadapi tantangan dalam proyek kemanusiaan di era yang terus berubah ini.

## 2. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada pada kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan studi independen adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di ITB Swadharma dan apa dampaknya terhadap fleksibilitas dalam memilih mata kuliah serta mengembangkan keahlian di luar kurikulum formal?
- b) Apa relevansi implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap kegiatan proyek kemanusiaan di era 5.0?
- c) Bagaimana fleksibilitas yang diberikan oleh kebijakan MBKM dapat membantu mahasiswa ITB Swadharma mengembangkan kemandirian, karakter yang kuat, dan profesionalisme yang tinggi dalam konteks proyek kemanusiaan?
- d) Bagaimana implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat membantu mahasiswa ITB Swadharma mengembangkan keterampilan yang relevan dengan proyek kemanusiaan, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi tim?
- e) Bagaimana implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat mendorong mahasiswa ITB Swadharma untuk memiliki sikap proaktif, inovatif, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam proyek kemanusiaan di era 5.0?
- f) Bagaimana implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat membantu mahasiswa ITB Swadharma mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kemanusiaan global dan mengaplikasikannya dalam proyek kemanusiaan?



- g) Apa peran kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam membentuk mahasiswa ITB Swadharma menjadi individu yang memiliki swadharma, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dalam proyek kemanusiaan di era 5.0?

Rumusan permasalahan di atas memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap kegiatan proyek kemanusiaan di era 5.0 dalam membentuk mahasiswa ITB Swadharma yang memiliki karakter yang kuat, profesional, serta memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berkontribusi secara efektif dalam proyek-proyek kemanusiaan.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

**Penelitian Deskriptif:** Metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi dan Bisnis (ITB Swadharma). Dengan menggunakan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan data tentang pemahaman mahasiswa dan staf akademik terkait kebijakan MBKM, tingkat partisipasi dalam program MBKM, dan persepsi mereka tentang dampak kebijakan tersebut. Selain itu, analisis dokumentasi dan data statistik juga dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi kebijakan MBKM di ITB Swadharma.

**Penelitian Kualitatif:** Metode ini dapat digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi mahasiswa ITB Swadharma terkait relevansi kebijakan MBKM dengan kegiatan proyek kemanusiaan di era 5.0. Dan dapat melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam proyek kemanusiaan atau yang memiliki pengalaman dalam menjalani program MBKM. Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dapat dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan penilaian subjektif yang muncul dari narasumber.

Metode penelitian kombinasi ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi kebijakan MBKM di ITB Swadharma, dampaknya terhadap partisipasi mahasiswa dalam kegiatan proyek kemanusiaan, dan persepsi mereka tentang relevansi kebijakan MBKM dalam membentuk mahasiswa ITB Swadharma yang memiliki karakter dan profesionalisme yang tinggi. Dengan menggabungkan pendekatan deskriptif dan kualitatif, dan dapat menggali data kuantitatif dan kualitatif yang mendalam untuk mendukung temuan penelitian.

#### 4. PEMBAHASAN

Pelaksanaan program MBKM di Perguruan Tinggi Indonesia telah berjalan sejalan dengan penyusunan kebijakan di tingkat Program Studi. Mahasiswa di seluruh Indonesia merespons positif terhadap pelaksanaan program MBKM yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, beberapa kendala dalam pelaksanaan program MBKM telah diidentifikasi berdasarkan hasil kajian beberapa artikel terkait. Kendala-kendala tersebut terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Kendala Implementasi Program MBKM

No	Kendala yang dihadapi Perguruan Tinggi
1	Kesulitan program studi dalam mengakui jumlah sks
2	Sebagian proses kegiatan MBKM dilakukan secara daring (online)
3	Dampak pandemi Covid-19
4	Kesulitan program studi dalam menyusun kurikulum MBKM
5	Tidak semua program studi di Perguruan Tinggi yang sama menjalankan MBKM
6	Terbatasnya mitra untuk kegiatan magang dan kewirausahaan dalam MBKM
7	Pembelajaran yang kurang inovatif

No	Kendala yang dihadapi Perguruan Tinggi
8	Kurangnya sosialisasi mengenai program MBKM
9	Keterlambatan penginputan nilai bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM
10	Tidak adanya program MBKM yang mengakomodasi penyandang disabilitas
11	Kesulitan dalam menemukan mitra kerjasama
12	Proses kerjasama antar Perguruan Tinggi yang rumit
13	Terlalu banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan
14	Tidak ada kesesuaian waktu perkuliahan dengan kegiatan di luar program studi
15	Adanya pembatasan kuota dalam program MBKM
16	Banyak dosen yang belum memahami program MBKM

Tabel 1 mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi dalam implementasi program MBKM berdasarkan riset yang dilakukan dan artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal. Mayoritas kendala yang tercantum dalam tabel tersebut dialami oleh Perguruan Tinggi, Program Studi, Dosen, dan Mahasiswa. Belum ada kendala yang diketahui terkait dengan mitra kerjasama. Program MBKM melibatkan mitra seperti sekolah tingkat SD dan SMP dalam kegiatan Asistensi Mengajar, perusahaan dalam kegiatan Magang, kewirausahaan, dan Studi Independen, serta mitra penelitian dan lembaga pemerintah dalam kegiatan proyek kemanusiaan atau magang lainnya. Mitra yang terlibat dalam kegiatan MBKM diharuskan mendaftar melalui platform yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mitra yang mendaftar meliputi kategori pemerintah, perusahaan, sekolah, dan perguruan tinggi.

Mitra-mitra ini akan melalui proses seleksi, dan yang memenuhi persyaratan akan diterima. Kendala-kendala yang dihadapi oleh program studi dan mahasiswa dalam program MBKM ini antara lain kesulitan dalam menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kurikulum MBKM, keterbatasan mitra dalam kegiatan studi independen dan magang, keterbatasan waktu bagi dosen untuk mengikuti kegiatan MBKM karena jadwal yang padat. Selain itu, mahasiswa juga menghadapi kendala seperti kualitas jaringan internet yang tidak stabil, pembelajaran yang kurang interaktif, tidak adanya integrasi dalam penginputan nilai bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM, dan kurangnya komunikasi yang baik dengan mitra kerjasama.

Proyek Kemanusiaan merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada kondisi geografis Indonesia yang rentan terhadap bencana alam. Melalui proyek ini, perguruan tinggi melibatkan mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam penanganan bencana dan upaya pemulihan pasca bencana. Kegiatan ini bekerja sama dengan berbagai mitra yang telah terlibat dalam penanggulangan bencana seperti UNESCO, UNICEF, WHO, SAR, BNPT, dan lain sebagainya. Mahasiswa yang memiliki semangat dan motivasi tinggi akan difasilitasi dengan kegiatan yang mampu mengembangkan minat dan kompetensinya, sehingga mereka menjadi individu yang siap dan responsif dalam menghadapi bencana. Tujuan dari proyek kemanusiaan ini adalah untuk membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia dan unggul, serta melatih mereka agar memiliki rasa empati dan kepedulian sosial yang tinggi. Namun, pelaksanaan kegiatan ini menghadapi kendala berupa ketidakpastian terkait kelangsungan program, sehingga mahasiswa yang ingin berpartisipasi menjadi ragu, dan juga kendala-kendala yang muncul dalam masyarakat saat terjadi bencana turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek ini.

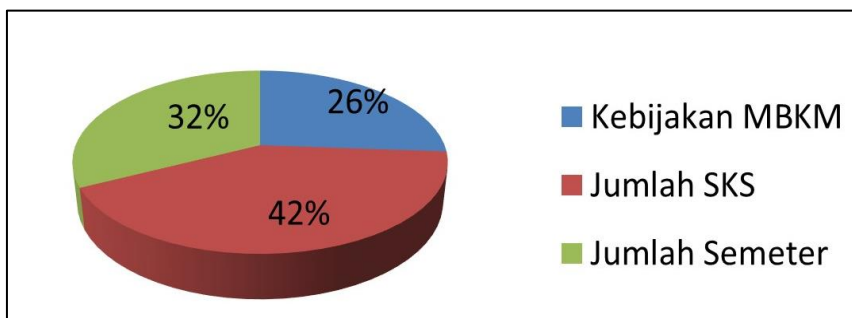
Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Swadharma memiliki relevansi yang signifikan terhadap kegiatan proyek kemanusiaan di era 5.0 dalam membentuk mahasiswa ITB Swadharma yang memiliki berkarakter serta profesional. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan MBKM di ITB Swadharma telah memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi mahasiswa dalam memilih mata kuliah dan mengembangkan keahlian di luar kurikulum formal. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengambil mata kuliah lintas disiplin dan mengikuti program-program kemanusiaan yang relevan dengan minat mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu kemanusiaan yang dihadapi dalam era 5.0.

Kebijakan MBKM memiliki dampak positif terhadap partisipasi mahasiswa dalam kegiatan proyek kemanusiaan. Mahasiswa yang terlibat dalam program MBKM melaporkan peningkatan keterampilan kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi tim yang diperlukan dalam proyek kemanusiaan. Mereka juga melaporkan pengembangan sikap proaktif, inovatif, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam konteks proyek kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan MBKM mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi yang relevan dengan proyek kemanusiaan di era 5.0.

Selain itu, implementasi kebijakan MBKM juga membantu mahasiswa ITB Swadharma mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kemanusiaan global. Melalui akses yang lebih luas terhadap sumber belajar dan kesempatan untuk belajar dari pengalaman di luar kampus, mahasiswa ITB Swadharma dapat mengembangkan wawasan yang lebih baik tentang tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam proyek kemanusiaan dengan cara yang relevan dan berkelanjutan. Berikut ini

pengetahuan mahasiswa terhadap kebijakan MBKM yang dicanangkan oleh pemerintah.

Gambar 10 Pengetahuan Mahasiswa terhadap Kebijakan MBKM



Pada gambar 10 dapat dijelaskan bahwa bahwa sebanyak 32% atau 135 mahasiswa sudah mengetahui sebagian besar isi kebijakan MBKM. Selain itu, diperoleh informasi bahwa sebesar 42% atau sebanyak 215 mahasiswa sudah mengetahui terkait jumlah SKS kegiatan MBKM di luar PT. Seluruh mahasiswa sudah mengetahui bahwa jumlah semester didalam atau di luar perguruan tinggi yaitu sebanyak 26% atau 167 Mahasiswa, sesuai dengan kebijakan MBKM Dirjen Dikti tahun 2020.

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di ITB Swadharma memiliki dampak positif terhadap kegiatan proyek kemanusiaan di era 5.0 dalam membentuk mahasiswa ITB yang memiliki swadharma, berkarakter, serta profesional. Fleksibilitas yang diberikan oleh kebijakan MBKM memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan kritis, pemecahan masalah, kolaborasi tim, sikap proaktif, inovatif, serta pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kemanusiaan global. Semua ini berkontribusi dalam membentuk mahasiswa ITB Swadharma yang siap menghadapi tantangan dan memberikan kontribusi yang bermakna dalam proyek kemanusiaan di era yang terus berubah ini.

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Swadharma memiliki relevansi yang signifikan terhadap kegiatan proyek kemanusiaan di era 5.0 dalam membentuk mahasiswa ITB Swadharma yang berkarakter serta profesional. Penelitian deskriptif menunjukkan bahwa kebijakan MBKM di ITB Swadharma telah berhasil diimplementasikan dengan memberikan fleksibilitas dalam memilih mata kuliah dan mengembangkan keahlian di luar kurikulum formal. Mahasiswa dapat mengakses berbagai program dan kegiatan yang relevan dengan proyek kemanusiaan, seperti program magang, penelitian, pengabdian masyarakat, dan proyek kolaboratif dengan pihak eksternal. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperoleh pengalaman praktis yang berharga dalam konteks proyek kemanusiaan.

Dampak Kebijakan MBKM terhadap Partisipasi Mahasiswa menunjukkan bahwa kebijakan MBKM telah meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan proyek kemanusiaan. Mahasiswa yang terlibat dalam program MBKM melaporkan peningkatan keterampilan kolaborasi tim, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Mereka juga mengungkapkan bahwa kebijakan MBKM mendorong mereka untuk mengambil inisiatif dan berperan aktif dalam proyek kemanusiaan, yang membantu mereka dalam membentuk karakter yang kuat dan profesional.

Pengembangan Kompetensi yang Relevan dengan Proyek Kemanusiaan di ITB memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber belajar dan kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang isu-isu kemanusiaan global. Mahasiswa melaporkan peningkatan pemahaman mereka tentang isu-isu seperti ketimpangan sosial, krisis kemanusiaan, dan keberlanjutan. Mereka juga mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam proyek kemanusiaan, seperti melakukan analisis dampak, mengidentifikasi solusi yang inovatif, dan berinteraksi dengan masyarakat terkait.

Implementasi kebijakan MBKM membantu membentuk mahasiswa ITB Swadharma, yaitu pemahaman dan penghayatan akan tanggung jawab sosial dan etika dalam konteks proyek kemanusiaan. Mahasiswa melaporkan adanya peningkatan kesadaran akan tanggung jawab sosial mereka sebagai mahasiswa dan calon profesional. Mereka juga melaporkan peningkatan dalam pengembangan sikap profesional, seperti integritas, kerjasama, dan kepemimpinan yang efektif. bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar

Kampus Merdeka di ITB Swadharma memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kegiatan proyek kemanusiaan di era 5.0 dalam membentuk mahasiswa ITB Swadharma yang berkarakter serta profesional. Melalui fleksibilitas yang diberikan oleh kebijakan MBKM, mahasiswa ITB Swadharma dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan proyek kemanusiaan. Mahasiswa ITB Swadharma yang terlibat dalam program MBKM memiliki kemampuan kolaborasi tim yang baik. Mereka mampu bekerja secara efektif dalam tim multidisiplin untuk menyelesaikan tugas-tugas proyek kemanusiaan yang kompleks. Selain itu, mereka juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan mereka untuk menganalisis masalah, mengevaluasi berbagai solusi, dan membuat keputusan yang tepat dalam konteks proyek kemanusiaan.

Selain itu, implementasi kebijakan MBKM di ITB Swadharma memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan peluang pengembangan diri di luar lingkungan kampus. Melalui program magang, mahasiswa dapat mengalami situasi nyata di lapangan dan belajar langsung dari praktisi kemanusiaan. Mereka juga dapat terlibat dalam proyek kolaboratif dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga kemanusiaan lainnya, yang memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh dalam konteks nyata.



Kebijakan MBKM juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan sikap proaktif dan inovatif dalam proyek kemanusiaan. Melalui kebebasan akademik yang diberikan, mahasiswa ITB Swadharma dapat mengeksplorasi ide-ide baru dan menciptakan solusi yang inovatif untuk masalah kemanusiaan yang kompleks. Mereka juga didorong untuk mengambil inisiatif dan mengambil tanggung jawab dalam memimpin atau berpartisipasi dalam proyek-proyek kemanusiaan, yang membentuk karakter mereka sebagai pemimpin yang berkomitmen dan bertanggung jawab.

Dalam konteks profesionalisme, implementasi kebijakan MBKM membantu mahasiswa ITB Swadharma untuk mengembangkan etika kerja yang tinggi, integritas, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Dalam proyek kemanusiaan di era 5.0 yang penuh dengan tantangan dan perubahan cepat, mahasiswa ITB Swadharma dilatih untuk menghadapi dan mengatasi situasi yang kompleks serta untuk tetap menjaga integritas dalam menjalankan proyek-proyek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di ITB Swadharma memiliki dampak yang positif dan relevan terhadap kegiatan proyek kemanusiaan di era 5.0 dalam membentuk mahasiswa ITB Swadharma yang berkarakter, profesional serta fleksibilitas.

## **5. KESIMPULAN**

Kurikulum merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran. Penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar memiliki keilmuan yang relevan dengan dunia kerja, serta memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang ingin mereka ambil. Implementasi kurikulum MBKM sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dilakukan dengan menggunakan pendekatan OBE

(*Outcome Based Education*), di mana fokusnya adalah mencapai hasil pembelajaran yang sesuai dengan disiplin ilmu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengamatan mendalam terhadap permasalahan seputar MBKM dan menganalisis kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas teknologi ITB Swadharma memiliki pemahaman yang positif dan memadai tentang kebijakan, fungsi, dan manfaat yang diperoleh dalam implementasi MBKM. Para mahasiswa menunjukkan persepsi positif ini melalui minat dan kesiapan mereka untuk mengambil program MBKM selama masa studi.

Program MBKM juga dinilai sebagai sarana untuk melengkapi mahasiswa dengan kompetensi tambahan dan soft skills yang diperlukan untuk pengembangan diri, baik saat ini maupun di masa kerja di masa depan. Kontribusi implementasi MBKM juga dinilai dari kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian melalui pengalaman langsung di lapangan, mencari pengetahuan, menganalisis permasalahan nyata, berkolaborasi dan berinteraksi sosial, serta mengelola diri sendiri. Dengan demikian, lulusan mahasiswa akan siap menghadapi persaingan baik dalam skala nasional maupun global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chen, L., Zhang, X., & Wang, Y. (2022). The Impact of Merdeka Belajar Kampus Merdeka on Critical Thinking and Problem-Solving Skills: A Case Study of Indonesian Higher Education. *International Journal of Higher Education*, 11(2), 180-194.
- Dirjen Dikti Kemendikbud. (2020). Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka>
- Johnson, R., Pratiwi, A., & Setyaningrum, A. (2020). Character Development of Students Through Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Journal of Vocational Education*, 4(2), 95-102.
- Lee, J., Setiawan, M., & Pramono, R. (2021). Enhancing Professionalism of Higher Education Students through Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Journal of Education and Learning*, 10(6), 607-615.
- Li, Y., Hidayatullah, A. F., & Tjahjono, H. K. (2021). The Role of Merdeka Belajar Kampus Merdeka in Developing Students' Proactive Attitude. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 20(12), 57-72.
- Leuwol, N. V., Wula, P., Purba, B., Marzuki, I., Brata, D. P. N., Efendi, M. Y., Masrul, M., Sahri, S., Ahdiyat, M., & Sari, I. N. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Muhsin, H. (2021). Kampus Merdeka Di Era New Normal. Dalam: A. Muslihat dkk. *Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar: Sebuah Bunga Rampai Dosen*. 143. Bintang Visitama Publisher.
- Smith, A., Prabowo, H., & Putra, R. I. (2019). The Role of Merdeka Belajar Kampus Merdeka in Developing Students' Self-Regulated Learning. *Journal of Education and Learning*, 8(3), 235-242.
- Wang, J., Chen, S., & Kusumaningrum, I. (2023). Expanding Global Awareness through Merdeka Belajar Kampus Merdeka: A Case Study of Indonesian Higher Education. *International Journal of Global Education*, 2(1), 25-40.
- Wijayanto, A. (2021). Implementasi dan Problematika Merdeka Belajar. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yshk6>

## BAB VI

# KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN RELEVANSINYA DALAM KEGIATAN MAGANG UNTUK PENINGKATAN SOFTSKILL MAHASISWA

Nur Sucahyo  
Universitas Islam Indonesia, Bandung  
n.sucahyo12@gmail.com

### 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Menurut Dunn, kebijakan publik merupakan ‘long series or more less related choices (including decision not to act) made by governmental bodies and officials, are formulated in issue areas which range from defence, energy and health to education, welfare and crime control’ (1981:47). MacRae Jr. dan Wilde mendefinisikannya sebagai ‘a policy made by government. Policy is a chosen course of significantly affecting large numbers of people’ (1985:3). Pakar kebijakan publik lainnya, Anderson menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah ‘those policies developed by governmental bodies and officials’. Nongovernmental actors and factors may, of course, influence policy development’ (1978:3). Tampak bahwa negara atau pemerintah sangat strategis dalam pembentukan kebijakan publik ini. Hal ini sejalan dengan pandangan Michael bahwa ‘without the

existence of the state, the public policy making process, as we know it, could not operate. It is the state that provides the basis for collective decision making, the application and enforcement of those decisions, and the means for changing or altering others' (2006: 11). Ini sejalan dengan pendapat Gerston tentang komponen kebijakan publik yaitu isu (issues), aktor (actor), sumberdaya (resource), lembaga (institution) dan tingkat pemerintahan (the level of government). Dikemukakan lebih lanjut bahwa 'issues that appear on the public agenda; actors who present, interpret, and respond to those issues; resources affected by those issues; institutions that deal with issues; and the levels of government that address issues' (2010:8). Untuk dapat memahami kebijakan publik secara utuh maka bisa dikenali dengan apa yang dinamakan Anderson sebagai kategori kebijakan, yaitu 'policy demands, policy decisions, policy statements, policy output dan policy outcome' (1978:4).

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/

proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Sesuai dengan tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Kampus Merdeka adalah sebuah konsep revolusioner dalam pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas, inovatif, dan kolaboratif. Konsep ini dikembangkan untuk membebaskan kreativitas, menumbuhkan semangat kewirausahaan, serta meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, pendidikan tinggi perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kampus Merdeka mengusung visi untuk menciptakan mahasiswa yang mandiri, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dalam konsep ini, mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih dan mengatur kurikulum, serta memiliki kendali atas proses belajar mereka sendiri. Salah satu prinsip utama dari Kampus Merdeka adalah penghapusan batasan-batasan kurikulum yang kaku. Mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih mata kuliah yang ingin mereka ambil, termasuk di luar disiplin ilmu utama mereka. Mereka dapat menjelajahi berbagai bidang studi, mengeksplorasi minat pribadi, dan mengembangkan keahlian lintas disiplin.

Kampus Merdeka mendorong pengembangan keterampilan kewirausahaan dan kreativitas. Mahasiswa didorong untuk berpikir *out-of-the-box*, mengembangkan ide-ide inovatif, dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Mereka diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan mitra industri, merancang proyek-proyek yang relevan, dan memperoleh pengalaman praktis yang berharga. Kolaborasi juga menjadi inti dari Kampus Merdeka. Mahasiswa didorong untuk bekerja dalam tim lintas disiplin, berbagi pengetahuan, dan memecahkan masalah bersama. Mereka dapat mengakses sumber daya yang ada di kampus, seperti laboratorium, pusat riset, dan perpustakaan, untuk mendukung eksplorasi dan penelitian mereka. Dengan adanya Kampus Merdeka, diharapkan lulusan perguruan tinggi akan memiliki keunggulan kompetitif di dunia kerja. Mereka akan memiliki keterampilan yang relevan, kreativitas yang tinggi, dan sikap kewirausahaan yang kuat. Konsep ini juga membuka pintu bagi kolaborasi

antara perguruan tinggi, industri, dan komunitas, sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang dinamis dan berkelanjutan. Kampus Merdeka merupakan konsep revolusioner dalam pendidikan tinggi yang mengutamakan kebebasan, inovasi, dan kolaborasi. Dengan menghapuskan batasan-batasan kurikulum, mempromosikan kewirausahaan, dan mendorong kolaborasi, Kampus Merdeka berpotensi menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Konsep ini membangun pondasi yang kokoh untuk pendidikan yang adaptif, relevan, dan memberdayakan.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai keilmuan di bidang keahliannya yang berguna untuk memasuki dunia kerja (Susilawati, 2021; Sopianasyah & Masrurroh, 2022; Sudaryanto, Widayati, & Amalia, 2021). Program MBKM memiliki paradigma yang mirip dengan kebijakan *link and match* (Kodrat, 2021;), substansinya mengutamakan praktik di lapangan (*link and matcth*) (Susetyo, 2020). Sehingga luaran yang diharapkan dari program ini adalah terbentuknya kesiapan mahasiswa (baik *soft skills* maupun *hard skills*) yang relevan dengan perkembangan zaman, mampu dan terampil pada saat memasuki dunia kerja dan juga dapat berperan sebagai pencipta lapangan kerja baru.

Salah satu skema dalam program Kampus Merdeka adalah skema magang, di mana mahasiswa dapat berpartisipasi dalam program magang yang relevan dengan bidang studi mereka. Skema magang dalam program Kampus Merdeka menawarkan peluang yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja yang praktis di lingkungan kerja nyata. Dalam skema magang, mahasiswa dapat belajar dari praktisi profesional dalam bidang mereka dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk karir masa depan mereka.



Program magang Kampus Merdeka juga memberikan manfaat bagi perusahaan dan industri. Perusahaan dapat merekrut calon pekerja yang berkualitas dan terlatih, sementara industri dapat memperoleh tenaga kerja yang siap bekerja dan terampil. Program magang dalam skema Kampus Merdeka tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa, perusahaan, dan industri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dengan adanya program magang ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja yang bermanfaat dan meningkatkan keterampilan mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Selain itu, skema magang Kampus Merdeka juga dapat membantu mengurangi kesenjangan antara dunia akademik dan dunia industri. Mahasiswa dapat belajar tentang praktik-praktik terbaru dan tren dalam industri, yang dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dengan lebih baik. Dalam jangka panjang, skema magang Kampus Merdeka juga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, program magang ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia.

## **2. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan beberapa masalah yang timbul pada kebijakan pemerintah mengenai merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk program magang:

- a) Apakah terjadi pemahaman yang baik mengenai konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi dosen maupun mahasiswa terutama Program Magang?

- b) Apakah terjadi kesenjangan antara apa yang diajarkan di perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang ?
- c) Apakah terjadi kesenjangan antara konsep program tersebut dan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut dengan efektif ?
- d) Apakah Perguruan tinggi memiliki sumber daya yang cukup untuk memfasilitasi program magang dengan baik ?
- e) Apakah mitra perguruan tinggi memahami program tersebut ?
- f) Apakah aspek regulasi dan kebijakan sangat berpengaruh terhadap MBKM program magang ?
- g) Apakah ada standar yang jelas dalam implementasi program Kampus Merdeka ?

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Swadharma Jakarta pada Program Studi Sistem Informasi program sarjana dan Program Studi Teknik Informatika Program sarjana. Peneliti memilih ITB Swadharma karena ITB Swadharma adalah salah satu perguruan tinggi yang telah melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada program magang.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan baik terhadap dosen program studi, dosen pembimbing, maupun mahasiswa. Observasi dilakukan dengan mengamati kemampuan para mahasiswa yang mengikuti program magang ini dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengikuti program ini.

## **4. PEMBAHASAN**

### **4.1 Bentuk Pelaksanaan Magang**

Magang merupakan penugasan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan bidang atau mata kuliah di lapangan dan menulis laporan kegiatan secara tertulis. Pada program Studi di ITB Swadharma Magang merupakan mata kuliah wajib yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa. Magang berdasarkan Kampus Merdeka dapat dilaksanakan dalam 1 - 2 Semester, setara dengan 20 SKS - 40 SKS yang dilaksanakan di instansi/lembaga pemerintah atau swasta, pada bidang yang terkait dengan penerapan ilmu sejauh relevan dan sesuai dengan CPL dari Mata Kuliah pada Program Studi. Melalui program MBKM yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka diharapkan *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program MBKM juga diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat yang juga sejalan dengan dengan visi misi program studinya.

### **4.2 Pelaksanaan Program Magang MBKM**

Keberhasilan penyelenggaraan program Magang MBKM membutuhkan keharmonisan hubungan para pihak, yaitu pihak Perguruan Tinggi, mahasiswa sebagai peserta magang MBKM dan Lembaga/instansi mitra. Kondisi tersebut diharapkan selalu terbentuk secara sehingga keberhasilan penyelenggaraan maupun pencapaian tujuan magang MBKM dapat tercapai.

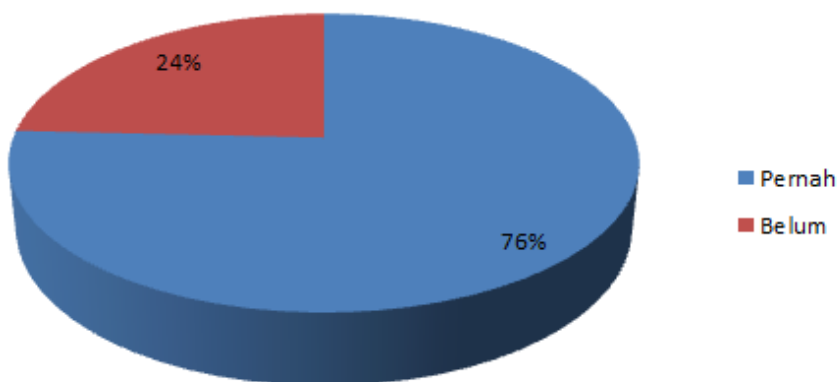
Dalam penelitian ini dibahas beberapa aspek meliputi keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam program ini. Berdasarkan hasil survei terkait dosen dalam pelaksanaan Magang MBKM menunjukkan bahwa terdapat dua hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Keterlibatan Dosen

*Dosen sebagai Pembimbing*

Untuk kelancaran proses pelaksanaan Magang MBKM, keterlibatan Dosen dalam pelaksanaan program ini terlihat cukup baik, karena 76% dosen pernah menjadi pembimbing dalam tugas magang/kerja praktik. Keterlibatan dosen dalam program magang/kerja praktik sudah sangat tinggi. Hal ini terlihat pada gambar berikut.

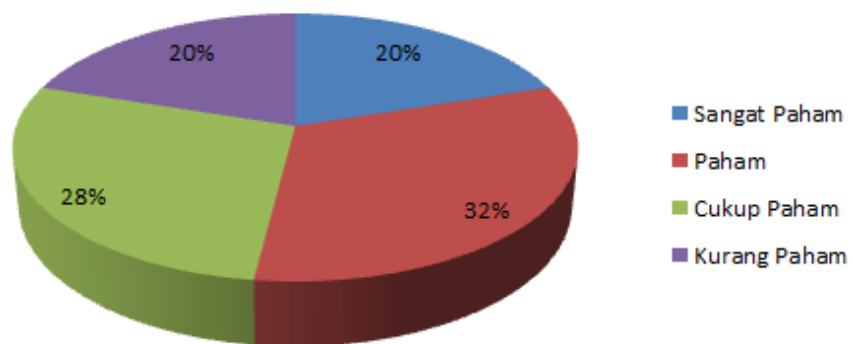
Gambar 11 Dosen Pembimbing



### *Pemahaman Dosen tentang MBKM*

Dari para dosen yang pernah menjadi pembimbing, tingkat pemahaman tentang program MBKM dapat dilihat pada gambar 12. Hal ini dapat terlihat pada hasil survei yang dilakukan kepada dosen sebagai berikut.

Gambar 12 Pemahaman Dosen tentang MBKM

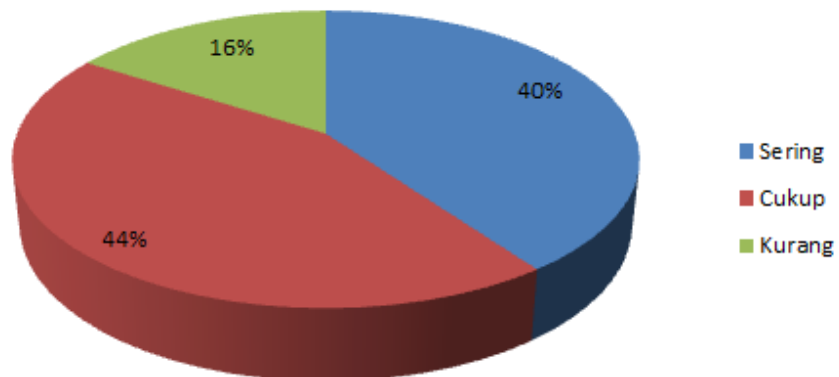


Data tersebut menunjukkan bahwa 20% dosen yang sangat memahami, 32% dosen yang paham, 28% dosen cukup paham dan 20% dosen yang kurang paham. Dari data tersebut memberikan gambaran bahwa tingkat pengetahuan dosen dalam pelaksanaan program ini cukup baik.

### *Sosialisasi MBKM ke Dosen*

Pemahaman tentang MBKM juga dipengaruhi juga dipengaruhi oleh pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan kepada dosen dalam pelaksanaan sosialisasi program Magang MBKM sebagai berikut.

Gambar 13 Sosialisasi MBKM ke Dosen

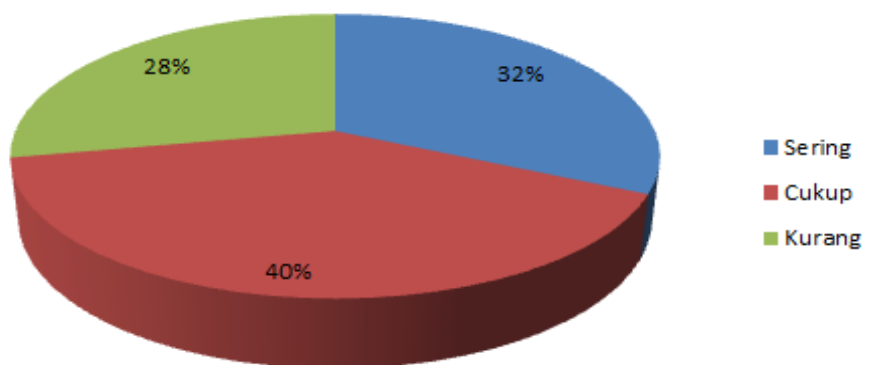


Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada dosen berjalan baik, hal ini terlihat dari hasil jawaban dosen yang menunjukkan 40% menjawab sering, 44% sering, dan 16% kurang. Seringnya sosialisasi berdampak pada tingkat penahaman dosen terkait perogram ini.

### *Peran Dosen dalam Melakukan Bimbingan*

Dalam melakukan proses pembimbingan, dosen pembimbing Magang MBKM memberikan arahan secara langsung kepada mahasiswa dalam memberikan pengarahan sebelum pelaksanaan Magang MBKM. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan data pada gambar berikut.

Gambar 14 Arahan Dosen kepada Mahasiswa



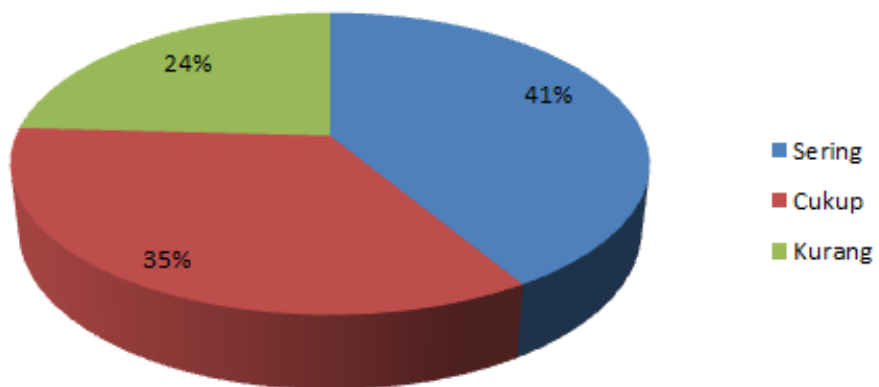
Dari data tersebut memberikan gambaran bahwa 32% jawaban yang menyatakan bahwa dosen sering melakukan arahan kepada mahasiswa, 40% menyatakan cukup dan sisanya 28% menyatakan kurang sehingga data diatas dapat disimpulkan bahwa pengarahan yang dilakukan oleh dosen pembimbing masih baik. Hal tersebut berdampak pada Dosen pembimbing dalam dapat menghubungkan dan menyesuaikan kompetensi mahasiswa dengan apa yang harus dikerjakan mahasiswa di instansi mitra.

Selain itu, mahasiswa juga banyak yang masih merasakan hal yang sama dalam melaksanakan magang MBKM di instansi karena mengetahui apa yang harus dilakukan di instansi. Pembimbing juga baik dalam mendampingi mahasiswa dalam menyusun jadwal kegiatan magang MBKM maupun dalam penyusunan urian tugas yang akan dilakukan oleh mahasiswa dalam pelaksanaan program amgam MBKM. Hal ini juga dikarenakan baiknya komunikasi antara mahasiswa dengan Dosen Pembimbing.

#### *Peran Dosen dalam Komunikasi*

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 15 Komunikasi Dosen kepada Mahasiswa



Berdasarkan gambar diatas didapatkan data bahwa 41% Dosen dan Mahasiwa seriing berkomunikasi, 35% Dosen dan Mahasiwa cukup sering berkomunikasi, 24% Dosen dan Mahasiwa kurang dalam berkomunikasi. Dari data tersebut kita



dapat disimpulkan bahwa intensitas komunikasi antara Dosen dan mahasiswa sangat perlu, hal tersebut berdampak pada pelaksanaan program magang MBKM.

b) Keterlibatan Mahasiswa dalam Pelaksanaan Magang MBKM

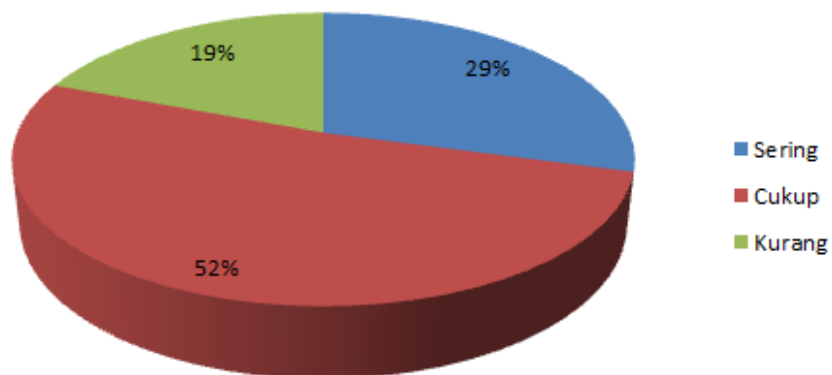
Berdasarkan hasil survei terkait keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan Magang MBKM menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek keterlibatan mahasiswa terkait Magang MBKM.

*Sosialisasi Mahasiswa tentang Program Magang MBKM*

Keberhasilan Pelaksanaan program Magang MBKM sangat dipengaruhi oleh mahasiswa kesiapan mahasiswa untuk mengikuti program tersebut, tingkat pengetahuan menjadi kunci utama agar mahasiswa berpartisipasi dalam pelaksanaan program Magang MBKM. Perguruan Tinggi melakukan langkah kongkrit agar pemahaman mahasiswa terkait program Magang MBKM dapat ditingkatkan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah sosialisasi terkait pelaksanaan program Magang MBKM. Sosialisasi sudah dilakukan dengan baik dan memberikan pengarahan yang mendalam program Magang MBKM. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada mahasiswa yang menunjukkan bahwa 29% mahasiswa menjawab Perguruan Tinggi sering melakukan sosialisasi, 52% mahasiswa menyatakan bahwa Perguruan Tinggi cukup melakukan sosialisasi, hanya 19% mahasiswa menganggap kegiatan sosialisasi masih kurang Data tersebut secara rinci dapat kita lihat pada gambar dibawah:

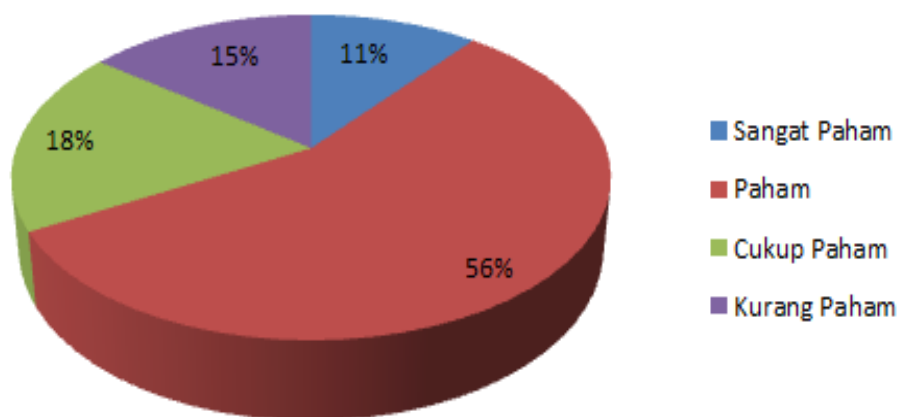
Gambar 16 Sosialisasi MBKM ke Mahasiswa



*Pemahaman Mahasiswa tentang Magang MBKM*

Banyaknya Sosialisasi yang dilakukan oleh institusi berdampak pada banyak mahasiswa yang memahami secara utuh terkait program tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil survei pada gambar berikut.

Gambar 17 Pemahaman Mahasiswa tentang MBKM

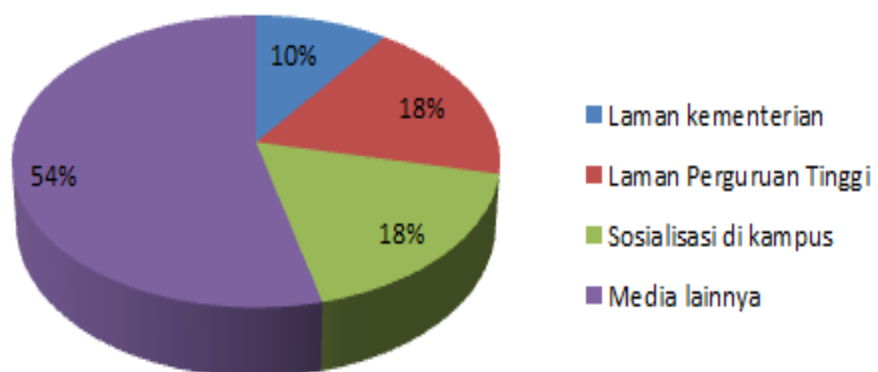


Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa sangat baik, mahasiswa yang sangat paham dengan program Magang MBKM 11% sedangkan mahasiswa yang paham mencapai 56%, mahasiswa yang cukup paham 18% dan mahasiswa yang kurang paham 15%<sup>5</sup>. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terkait program magang MBKM sangat baik dikarenakan pihak perguruan tinggi telah melakukan sosialisasi kepada mahasiswa.

#### *Informasi Magang BMKM*

Baiknya pemahaman oleh mahasiswa juga disebabkan oleh sumber untuk mendapatkan informasi tentang program Magang MBKM, hal ini berdasarkan hasil survei yang dapat dilihat pada gambar berikut.

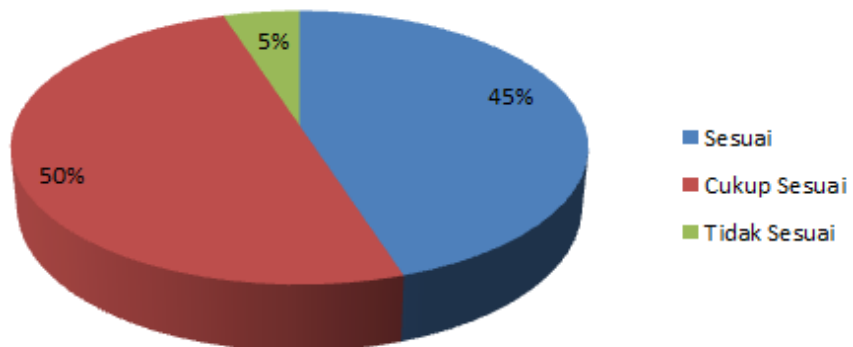
Gambar 18 Informasi MBKM



### *Kesesuaian magang Dengan Yang Diharapkan Mahasiswa*

Pelaksanaan Magang MBKM dilakukan dengan program yang disesuaikan dengan minat mahasiswa dan permasalahan yang dihadapi institusi/lembaga sasaran Magang, dan diarahkan secara bersama-sama oleh pembimbing di institusi/lembaga sasaran dan pembimbing di prodi/jurusan. Dalam pelaksanaan program kerja, banyak mahasiswa yang merasakan pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat pada hasil survei mahasiswa sebagai berikut.

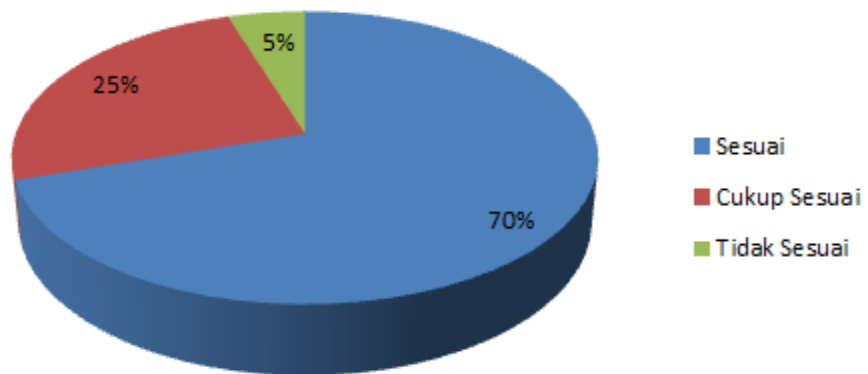
Gambar 19 Kesesuaian dengan Harapan Mahasiswa



Dari gambar di atas terlihat jawaban mahasiswa yang menunjukkan bahwa 45% menjawab sesuai, 50% menunjukkan cukup sesuai, dan hanya 5% menjawab tidak sesuai. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan mahasiswa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut terjadi disebabkan karena instansi mitra memahami program Magang MBKM disamping pilihan tempat magang sudah dipilih oleh mahasiswa.

## *Kesesuaian dengan Bidang Ilmu*

Gambar 20 Kesesuaian dengan Bidang Ilmu



Dari gambar di atas terlihat jawaban mahasiswa yang menunjukkan bahwa 70% menjawab sesuai, 25% menunjukkan cukup sesuai, dan hanya 5% yang menjawab tidak sesuai. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan mahasiswa yang dilaksanakan masih sudah sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki sebagai mahasiswa.

## 5. KESIMPULAN

Dalam program Kampus Merdeka Belajar diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antarasemua pihak yang terlibat dalam program Kampus Merdeka, termasuk perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah, untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diperlukan tersedia dan diterapkan secara efektif.

Program MBKM juga menghadapi tantangan dalam hal pengintegrasian antara pendidikan dan dunia kerja. Program magang ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman praktis dan memperluas wawasan mahasiswa, sehingga mereka lebih siap untuk memasuki dunia kerja setelah lulus. Kesenjangan antara apa yang diajarkan di perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang, diperlukan adanya upaya untuk memperkuat koneksi antara perguruan tinggi dan dunia kerja, sehingga program magang Kampus Merdeka dapat menjadi jembatan yang efektif untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Program MBKM memiliki beberapa tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi dalam implementasinya, termasuk regulasi dan kebijakan yang jelas, koordinasi yang baik antara perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah, serta integrasi antara pendidikan dan dunia kerja. Dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, program MBKM dapat memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Masalah lainnya adalah konsistensi dan standar yang jelas dalam implementasi program Kampus Merdeka di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan program magang ini, yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam kualitas pengalaman magang yang didapatkan oleh mahasiswa.

Masalah terkait dengan regulasi dan administrasi yang terkait dengan program magang MBKM. Beberapa perusahaan mungkin tidak terbiasa dengan program magang ini dan tidak memiliki proses rekrutmen atau pengawasan yang jelas untuk mahasiswa yang magang. Hal ini dapat mengakibatkan masalah keamanan dan kesehatan bagi mahasiswa serta kurangnya manfaat bagi perusahaan dan mahasiswa itu sendiri.

Program MBKM memiliki beberapa permasalahan yang perlu diatasi untuk memastikan kesuksesannya. Perlu adanya kerjasama antara perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah dalam memfasilitasi program ini dengan baik. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk meningkatkan sumber daya dan standar yang jelas dalam implementasi program Kampus Merdeka di seluruh Indonesia.

Dari sisi kebijakan publik, program MBKM memerlukan dukungan dan koordinasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang dibuat mendukung program ini, termasuk dalam hal pendanaan, pengembangan kurikulum, dan fasilitasi program magang.

Perguruan tinggi juga perlu melakukan penyesuaian dalam kurikulum dan metode pengajaran untuk mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti program magang MBKM. Mereka juga perlu melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan perusahaan untuk menyediakan tempat magang yang memadai dan memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman magang yang berharga. Sementara itu, perusahaan juga perlu berperan aktif dalam program ini, menyediakan tempat magang yang memadai dan memberikan pelatihan dan pengalaman praktis bagi mahasiswa. Mereka juga perlu terlibat dalam pengembangan kurikulum dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada perguruan tinggi.

Untuk memastikan keberhasilan program MBKM dari sisi kebijakan publik, perlu ada kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat dan adanya koordinasi yang efektif dalam implementasi program ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diperlukan tersedia dan diterapkan secara efektif, sementara perguruan tinggi dan perusahaan perlu berperan aktif dalam memfasilitasi program magang dan memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan manfaat yang optimal dari pengalaman ini.

Dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, program Kampus Merdeka dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis.

Dari sisi kebijakan publik, program MBKM juga memerlukan dukungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang dibuat mendukung program ini, termasuk dalam hal pendanaan, pengembangan kurikulum, dan fasilitasi program magang.

Pemerintah juga perlu berperan aktif dalam membentuk kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis. Perguruan tinggi juga perlu berperan aktif dalam program ini, dengan melakukan penyesuaian dalam kurikulum dan metode pengajaran untuk mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti program magang MBKM. Selain itu, perguruan tinggi juga perlu melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan perusahaan untuk menyediakan tempat magang yang memadai dan memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman magang yang berharga.

Sementara itu, perusahaan juga perlu berperan aktif dalam program ini, dengan menyediakan tempat magang yang memadai dan memberikan pelatihan dan pengalaman praktis bagi mahasiswa. Perusahaan juga perlu terlibat dalam pengembangan kurikulum dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada perguruan tinggi.



Untuk memastikan keberhasilan program MBKM dari sisi kebijakan publik, perlu ada kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang dibuat mendukung program ini, sementara perguruan tinggi dan perusahaan perlu berperan aktif dalam memfasilitasi program magang dan memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan manfaat yang optimal dari pengalaman ini.

Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting dalam menyediakan dana dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan program MBKM secara efektif. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa perguruan tinggi dan perusahaan mematuhi regulasi dan kebijakan yang ada, serta memantau pelaksanaan program ini secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan dari program MBKM tercapai dengan baik. Selain permasalahan yang telah disebutkan, ada juga tantangan dalam hal pendanaan untuk program Kampus Merdeka. Program magang yang diberikan oleh perusahaan pada mahasiswa memerlukan biaya, dan beberapa perusahaan mungkin tidak memiliki sumber daya untuk memberikan dukungan keuangan yang cukup untuk program magang.

Selain itu, beberapa perguruan tinggi mungkin juga kesulitan dalam membiayai program magang ini karena adanya keterbatasan dana. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk menyediakan pendanaan yang cukup untuk program MBKM.

Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait dengan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program magang. Penting untuk memastikan bahwa program ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa dan perusahaan, serta memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman magang yang aman dan bermanfaat.

Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa program magang berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kesimpulannya, program MBKM memiliki beberapa tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi untuk memastikan kesuksesannya. Dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan sangat penting dalam memfasilitasi program ini dengan baik dan memastikan bahwa mahasiswa dan perusahaan mendapatkan manfaat yang maksimal. Selain itu, perlu adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan pelaksanaan program magang berjalan dengan baik.

Selain tantangan yang telah disebutkan, ada juga permasalahan terkait dengan kualitas pendidikan dan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti program magang Kampus Merdeka. Beberapa mahasiswa mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk mengikuti program magang yang disediakan oleh perusahaan.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat kurikulum dan keterampilan yang diajarkan di perguruan tinggi, sehingga mahasiswa lebih siap untuk mengikuti program magang dan mendapatkan manfaat yang optimal dari pengalaman magang mereka.

Selain itu, ada juga tantangan dalam hal persaingan untuk mendapatkan tempat magang yang terbatas di perusahaan. Mahasiswa dari perguruan tinggi yang lebih terkenal atau yang memiliki koneksi yang lebih kuat mungkin memiliki keunggulan dalam mendapatkan tempat magang yang diinginkan, sedangkan mahasiswa dari perguruan tinggi yang kurang terkenal mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan tempat magang yang baik.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa program Kampus Merdeka diakses dengan adil dan merata oleh semua mahasiswa, terlepas dari perguruan tinggi tempat mereka belajar. Perlu juga adanya dukungan dari pemerintah dan perusahaan untuk memastikan bahwa kesempatan magang yang memadai tersedia untuk semua mahasiswa.

Kesimpulannya, program MBKM memiliki beberapa tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi, termasuk kualitas pendidikan dan kesiapan mahasiswa, persaingan untuk mendapatkan tempat magang, dan upaya untuk memastikan akses yang adil dan merata ke program magang. Perlu adanya kerjasama dan dukungan dari pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi untuk memfasilitasi program ini dengan baik dan memastikan kesuksesannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. (1978). *Public Policy Making*. Second Edition. New York
- Dunn, William N. (1981). *Public Policy Analysis: An Introduction*. PrenticeHall Inc. Englewood Cliffs.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. (Penerjemah: Samodra Wibawa dkk). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gerston, Larry N. (2010). *Public Policy Making. Process and Principles*. Third Edition. New York
- Hill, Michael. (1997). *The Policy Process in The Modern State*. Third Edition. London: Prentice Hall Harvester Wheatsheaf.
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: Oxford University Press.
- Kodrat, D. (2021). Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Policy. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(1): 9 - 14.
- MacRae Jr. D. dan Wilde James. (1989). *Policy Analysis for Public Decisions*. New York: University Press of America.
- Sopiansyah, D., & Masruroh, S. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1): 34-41. DOI: 10247476/reslaj.v4i1.458.
- Sudaryanto., Widayati, W., & Amalia, R. (2021). Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia. *Kode: Jurnal Bahasa*, 9(2): 78-93. <https://doi.org/10.24114/kjb.v9i2.18379>.
- Susetyo. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia*, 21 Oktober 2020, pp. 29-43. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/issue/view/956>

Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(3): 203-219. <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i3.108>.

## BIOGRAFI PENULIS



**Usanto S., S.Kom., M.Kom.**, merupakan penulis dan dosen pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma. Lahir di Brebes, 10 Juni 1978. Penulis merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara, dan menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di STMIK Indonesia prodi Sistem Informasi dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Bunda Mulia prodi Teknik Informatika. Penulis sebelumnya pernah menerbitkan buku dengan judul: Dasar-Dasar Pemrograman Java (Teori & Praktik) yang diterbitkan oleh CV. Pena Persada Surakarta. Penulis juga aktif dalam menulis Karya Tulis Ilmiah dalam bidang Ilmu Komputer lainnya.  
Email: usanto1006@gmail.com



**Sak Khie, S.E., M.M.**, dosen dan founder Smart Group yang terdiri dari beberapa divisi: pelatihan dan sertifikasi kompetensi, konsultasi bisnis dan manajemen, penulisan dan penerbitan, serta beberapa produk makanan. Penulis lahir di Pangkal Pinang, 11 Desember 1974. Ia menamatkan S1 di bidang ekonomi pada STIE Pelita Bangsa dan S2 di bidang manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen IMMI (STIMA IMMI). Saat ini penulis aktif sebagai dosen dan Kepala Bidang Laboratorium dan Unit Kewirausahaan Mahasiswa pada STIMA IMMI, sebagai pendamping pengembangan UMKM, serta sebagai pembicara dan mentor pada berbagai seminar, workshop, dan pelatihan di berbagai jenjang pendidikan dan instansi/lembaga.  
Email: smartlearningcenter007@gmail.com



**Agung Hardianto Wibowo, Dipl.-Ing. MSc. ME.,**

seorang Bisnis Konsultan dan Pemilik lembaga pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Exzellenz Institut. Lahir di Jakarta, 6 Juni 1974. Penulis merupakan anak Sulung dari tiga bersaudara, dan menamatkan program setara sarjana (S1) di fakultas teknik mesin Hochschule Fur Technik Karlsruhe, Germany dan program pasca sarjana (S2) nya di University for Applied Science Karlsruhe, Germany. Penulis adalah anggota Ikatan Alumni Lemhannas yang juga menjadi Dewan Pakar di Ikatan Alumni Jerman. Penulis aktif dalam Pemberdayaan UMKM, menjadi narasumber untuk program coaching maupun mentoring bisnis dari kementerian dan dinas terkait, serta menjadi mentor untuk putra-putri Indonesia yang kuliah di negeri Jerman, Prancis dan Turkiye.

Email: [coachagoeng@gmail.com](mailto:coachagoeng@gmail.com) | [linktr.ee/coachagoeng](http://linktr.ee/coachagoeng)



**Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.,** lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Februari 1978. Ia menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana pada Program Studi Sistem Informasi di STMIK Swadharma tahun 2004 dan menyelesaikan Program Pasca Sarjana pada prodi Ilmu Komputer pada Tahun 2013 di Universitas Bunda Mulia Jakarta. Ia mengajar di STMIK Swadharma mulai tahun 2005 dan menjabat sebagai Kepala Prodi Sistem Informasi STMIK

Swadharma sejak tahun 2013, yang pada saat ini telah menjadi Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Swadharma.

Email: [adisopian@gmail.com](mailto:adisopian@gmail.com)



Ida Farida Fitriyani, S.Ag., S.Kep., M.M., M.Kes., merupakan Kepala Seksi Pelayanan Umum di Kantor Kec. Sajira, Kab. Lebak, Prov. Banten. Lahir di Lebak, 21 Juli 1969, anak pertama dari sepuluh bersaudara ini menyelesaikan Studi S1 pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ma'had Baitul Arqom Al-Islami Bandung (1999), dan S1 Pendidikan Ilmu Keperawatan Universitas Muhamadiyah Tangerang (2022). Kemudian ia lulus S2 Manajemen SDM pada STIE IPWIJA Jakarta (2003) dan S2 Manajemen Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Reproduksi) Universitas Respati Indonesi (URINDO) Jakarta (2010). Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kec. Sajira Periode 2022-2025, Pengurus Kwarran (Kwartir Ranting) Kec. Cipanas Periode 2022-2025, dan anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sejak tahun 1990.

Email: idaf13632@gmail.com



Nur Sucahyo, S.Si., M.M., adalah seorang dosen pada pada Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Jakarta, selain itu juga sebagai konsultan pada PT Swadharma Sentra Solusi yang bergerak dalam bidang *training*, *consulting*, dan *services*. Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1969. Pendidikan S1 diselesaikan tahun 1993 pada Jurusan Matematika Universitas Indonesia, dan pendidikan S2 pada STIE IPWI Jakarta, saat ini sedang melanjutkan kuliah S3 di Universitas islam Nusantara Bandung.

Email: n.sucahyo12@gmail.com





# KEBIJAKAN PUBLIK DAN IMPLEMENTASI **MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan inisiatif yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih dan merancang jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Buku ini membahas kebijakan MBKM dan implementasinya melalui enam dari delapan macam kegiatan yang memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman:

(1) Pertukaran pelajar menjadi salah satu kegiatan yang mendorong mahasiswa untuk mengalami pengalaman belajar di luar negeri, memperluas wawasan budaya, dan meningkatkan kemampuan adaptasi; (2) Magang/praktik kerja memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam konteks nyata di dunia kerja; (3) Asistensi mengajar di satuan pendidikan memberikan mahasiswa kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran, membantu dosen atau guru, dan mengembangkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan; (4) Proyek kemanusiaan mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan; (5) Kegiatan wirausaha memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan berbisnis melalui pendirian dan pengelolaan usaha kecil atau startup; dan (6) Studi/proyek independen memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar secara mandiri di luar kurikulum, mengeksplorasi minat pribadi, dan mengembangkan kemampuan penelitian, analisis, dan kreativitas mereka.

